



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

jogja
istimewa



Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 Faximile (0274) 5203332
Email : walikota@jogjakota.go.id; Email Intranet : walikota@intra.jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

Tahun
2016



Tahun 2016

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan laporan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016 yang berisi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, selain itu memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan supaya lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta,

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

Handwritten signature of Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si

Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si

NIP. 19580819 198403 1 005

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK	VI
DAFTAR BAGAN	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. KONDISI GEOGRAFIS KOTA YOGYAKARTA	5
1. Batas Administrasi	5
2. Luas Wilayah	5
3. Topografis	6
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta	6
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta	6
E. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	19
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	26
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	43
B. REALISASI ANGGARAN	104
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	110
BAB IV : PENUTUP	117
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1	: Urusan Pemerintahan.	6
Tabel I.2	: Daftar Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	12
Tabel II.1	: Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	32
Tabel III.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	43
Tabel III.2	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016.	44
Tabel III.3	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	47
Tabel III.4	: Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	48
Tabel III.5	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.	50
Tabel III.6	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	55
Tabel III.7	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	61
Tabel III.8	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	67
Tabel III.9	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	70
Tabel III.10	: Perbandingan Angka Melek Huruf	71
Tabel III.11	: Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah	72
Tabel III.12	: Daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusi.	73
Tabel III.13	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	76
Tabel III.14	: Pendapatan Perkapita Kota Yogyakarta 2015-2016.	77
Tabel III.15	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	80
Tabel III.16	: Perbandingan Persentase (%) Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta.	81
Tabel III.17	: Perbandingan Angka Kemiskinan Tingkat Nasional, Propinsi dan Kota	81
Tabel III.18	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	84
Tabel III.19	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85
Tabel III.20	: Rerata Nilai Ujian Nasional.	86
Tabel III.21	: Hasil Kelulusan UN/UNPK Tahun 2016.	86
Tabel III.22	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	88
Tabel III.23	: Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015.	89
Tabel III.23	: Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015.	89

Tabel III.25 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2015	90
Tabel III.26 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap APBD 2012-2016	91
Tabel III.27 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11	95

Daftar Grafik

Grafik 1.1	: Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keadaan 31 Desember 2016	16
Grafik 1.2	: Jumlah Pegawai di Dinas Keadaan 31 Desember 2016	16
Grafik 1.3	: Jumlah Pegawai Lembaga Teknis Keadaan 31 Desember 2016	17
Grafik 1.4	: Jumlah Pegawai Kecamatan Keadaan 31 Desember 2016	17
Grafik 1.5	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2016.	18
Grafik 1.6	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Keadaan 31 Desember 2016.	18
Grafik 1.7	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon Keadaan 31 Desember 2016.	19
Grafik 1.8	: Jumlah kunjungan rawat jalan berdasarkan poliklinik tahun 2016	25
Grafik 1.9	: Jumlah admisi rawat inap berdasarkan jenis bangsal perawatan tahun 2016	26
Grafik III.1	: Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	48
Grafik III.2	: Volume sampah yang di buang ke TPA	63
Grafik III.3	: Angka Kemiskinan	82
Grafik III.4	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85
Grafik III.5	: Rerata Nilai Ujian Nasional.	86
Grafik III.6	: Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta	89
Grafik III.7	: Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap target APB 2012-2016	91
Grafik III.8	: Luasan RTH Kota Yogyakarta	98
Grafik III.9	: Pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	98
Grafik III.10	: Pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	99
Grafik III.11	: Pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100
Grafik III.12	: Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.	100

Daftar Bagan

Bagan I.1	: Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta	10
Bagan I.2	: Reformasi Birokrasi	20
Bagan I.3	: Prosedur Pengembangan Talent	21

Daftar Gambar

Gambar I.1	: Peta Kota Yogyakarta	5
Gambar I.2	: SIM Kepegawaian Pemkot	15
Gambar III.1	: Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemkot Yogyakarta	47
Gambar III.2	: Angka Harapan Hidup	51
Gambar III.3	: Pelayanan Perbaikan Gizi di Kelurahan	52
Gambar III.4	: Pelayanan Rumah Sakit	56
Gambar III.6	: Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	56
Gambar III.5	: Pelayanan Rawat Inap	56
Gambar III.7	: Sistem Drainase Skala Kota	62
Gambar III.8	: Depo Sampah	63
Gambar III.9	: Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran	63
Gambar III.10	: Website UPIK	68
Gambar III.11	: Angka Partisipasi Sekolah	71
Gambar III.12	: Pendidikan Inklusi	72
Gambar III.13	: Pelatihan koperasi	77
Gambar III.14	: Pelaku UMKM Batik Jumput Batikan Yogyakarta	78
Gambar III.15	: Perizinan Online	95
Gambar III.16	: Razia Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan	96
Gambar III.18	: Pengambilan Sampel Air.	97
Gambar III.17	: RTHP Kel Gunungketur	97
Gambar III.19	: Pemantauan Uji Udara Ambien Permukiman	99



BAB I

Pendahuluan





A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan capaian kinerja tahun kelima dari RPJMD periode 2012-2016. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016,
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta Dokumen Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2016 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 antara lain adalah:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama Tahun Anggaran 2016 yang merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2012-2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2016 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

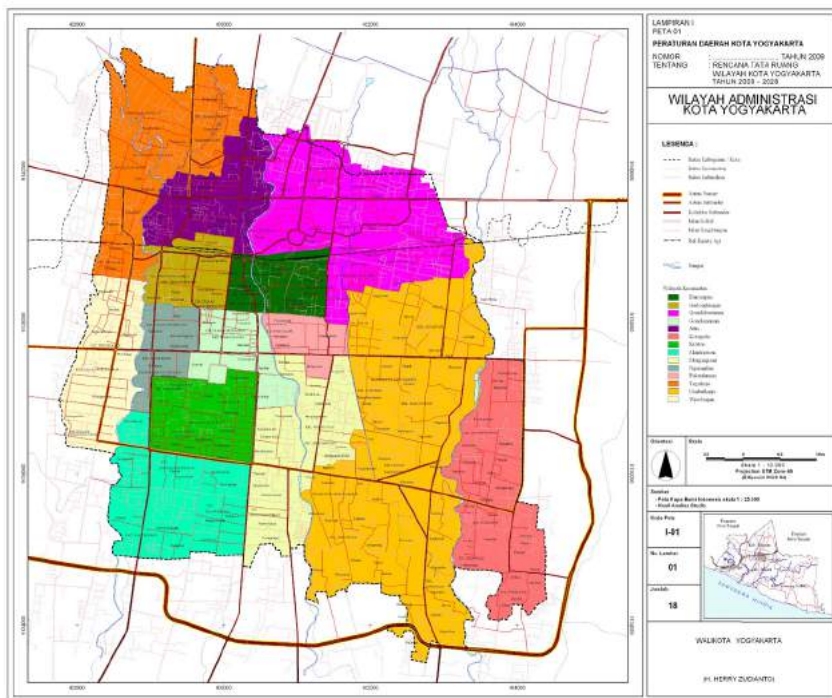
C. KONDISI GEOGRAFIS KOTA YOGYAKARTA

1. Batas Administrasi

Kota Yogyakarta terletak antara 110024' 19" - 1100 28' 53" Bujur Timur dan antara 070 49'26" - 070 15'24" Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

Sebelah utara	: Kabupaten Sleman
Sebelah timur	: Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan	: Kabupaten Bantul
Sebelah barat	: Kabupaten Bantul dan Sleman

Gambar I.1 : Peta Kota Yogyakarta



2. Luas Wilayah

Wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Secara administratif terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

3. Topografis

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpl. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan urusan wajib dan pilihan, yaitu :

Tabel I.1 : Urusan Pemerintahan

No	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Sosial
6.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1	Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan
4	Pertanahan
5.	Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Penanaman Modal
13	Kepemudaan dan Olah Raga
14	Statistik
15	Persandian
16.	Kebudayaan
17	Perpustakaan
18	Kearsipan
	URUSAN PILIHAN
1	KelautandanPerikanan
2	Pariwisata
3	Pertanian
4	Perdagangan
5	Kehutanan
6	Energidan Sumber Daya Mineral
7	Perindustrian
8	Perdagangan

Sehingga ada 23 urusan pemerintahan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/ Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, Sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud

telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- ✓ Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan;
- ✓ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- ✓ Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan fungsi, sebagai berikut :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Penyediaan pelayanan penunjang.
- ✓ Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- ✓ Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

4. Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah

Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan bentuk adaptabilitas lembaga terhadap dinamika zaman, tuntutan masyarakat, serta upaya penyesuaian dengan peraturan perundangan yang bersifat dinamis. Wujud dari restrukturisasi kelembagaan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan pembentukan kelembagaan baru, penggabungan kelembagaan, maupun penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan perangkat daerah tersebut akan terus bergulir dari waktu ke waktu mengikuti adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi perangkat daerah yang berlaku. Oleh karena itu, penataan kelembagaan ini menjadi dinamis yang juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan pemerintahan yang sifatnya juga dinamis. Bahkan, penataan kelembagaan juga bisa dilihat sebagai bentuk inovasi dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Di samping itu, penataan kelembagaan ini juga dalam rangka untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Dalam penataan kelembagaan OPD Kota Yogyakarta ini, dilakukan dalam rangka mengikuti dan merespons regulasi baru tentang perangkat daerah. Oleh karena itu, prinsip yang dilakukan adalah kebutuhan masyarakat, efektivitas dan efisiensi, keselarasan dengan regulasi yang ada, adaptabilitas lembaga terhadap konteks dan kebutuhan daerah, dan terakhir ini menekankan bahwa lembaga hasil penataan diharapkan menjadi katalisator bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi pembangunan jejaring, kerjasama, dan sharing antar lembaga, serta kegiatan lain yang dapat membawa perubahan positif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil dari Restrukturisasi Kelembagaan perangkat daerah adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Adapun Nama Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel I.2 : Daftar Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TYPE OPD
A. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		
1	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. Bagian Hukum
2	ASISTEN PEREKONOMIAN	1. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
		2. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
3	ASISTEN UMUM	1. Bagian Umum
		2. Bagian Protokol
		3. Bagian Organisasi
B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		B
C. DINAS DAERAH		
1.	Dinas Pendidikan	A
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	B
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	B
5.	Dinas Kesehatan	A
6.	Dinas Kebakaran	C
7.	Dinas Sosial	A
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	A
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
12.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
13.	Dinas Pertanian dan Pangan	B
14.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	A
15.	Dinas Lingkungan Hidup	A
16.	Dinas Perhubungan	B
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
18.	Dinas Kebudayaan	A
19.	Dinas Pariwisata	A
20.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	A
C. INSPEKTORAT		A

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		TYPE OPD
D. Satuan Polisi Pamong Praja			A
E. BADAN DAERAH			
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		A
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		A
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		B
F. KECAMATAN & KELURAHAN			
1	Kecamatan	Kecamatan Danurejan	A
		Kecamatan Gedongtengen	
		Kecamatan Gondokusuman	
		Kecamatan Gondomanan	
		Kecamatan Jetis	
		Kecamatan Kotagede	
		Kecamatan Kraton	
		Kecamatan Mantrijeron	
		Kecamatan Mergangsan	
		Kecamatan Ngampilan	
		Kecamatan Tegalrejo	
		Kecamatan Umbulharjo	
		Kecamatan Wirobrajan	
	Kecamatan Pakualaman	B	
2	Kelurahan	45 KELURAHAN	
Unit Pelaksana Teknis (UPT)			
1	Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
2	Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan		
3	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup		
4	Unit Pelaksana Teknis Yogyakarta Emergency Services 119 Pada Dinas Kesehatan		
5	Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
6	Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikandan Resource Center Pada Dinas Pendidikan		
7	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
8	Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TYPE OPD
OPD YANG TIDAK DIUBAH		
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	
2.	KANTOR KESATUAN BANGSA	
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Pengadaan CPNS terakhir pada Tahun 2014 yang pelaksanaannya menggunakan sistem *Computer Asisted Test* (CAT) sebanyak 74 orang dengan rincian 20 orang tenaga guru, 8 orang tenaga kesehatan dan 46 orang tenaga teknis, yang penempatannya sesuai dengan penetapan formasi dari Walikota Yogyakarta. Di tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan Formasi melalui Sistem E-Formasi KeMen-PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara sebanyak 3346 formasi, Namun dengan adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 dan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/501/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Sanggahan terkait dengan adanya jadwal penerimaan CPNS Tahun 2016. Dengan adanya Penundaan Penambahan Pegawai ASN dan dengan adanya Pegawai ASN yang pensiun rata – rata pertahun 350 orang berdampak pada pemenuhan pegawai di setiap SKPD hanya rata – rata 60 %.

Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebelum ada pelimpahan ke Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 7328 orang, dan sampai dengan akhir Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta setelah ada pelimpahan berdasarkan Berita Acara serah terima personel, sarana prasarana serta dokumen dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 137/3312,120/11462 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Berita

Acara Nomor 120/11432,137/3305 jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi 5905 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Guru sebanyak 2153 orang (36,46%), dan non guru sebanyak 3752 orang (63,54%).

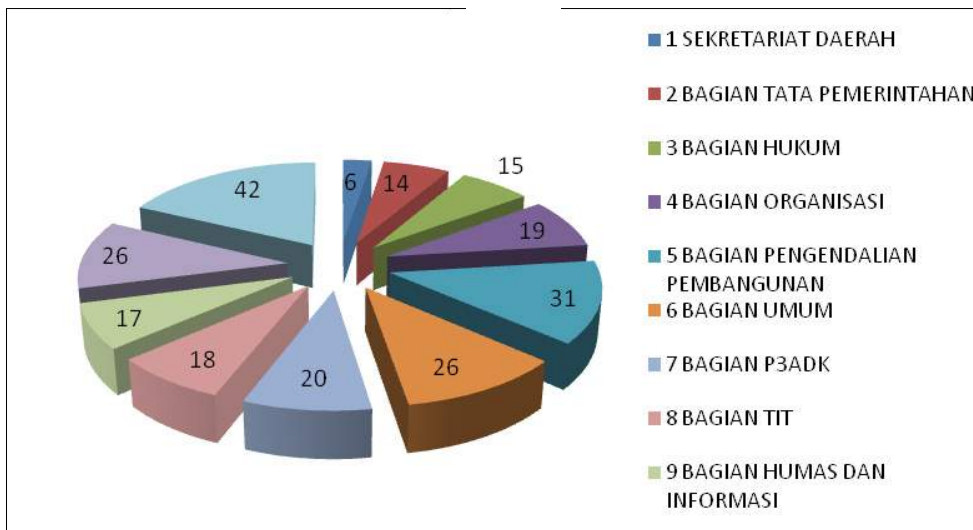
Berdasarkan Analisa Jabatan kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta idealnya sebelum serah terima personil adalah 11.877 orang yaitu 2.803 guru dan 9074 non guru yang terdiri dari struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu selain guru, tetapi setelah serah terima personel kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 10.889 orang yang terdiri dari 1798 guru dan 9161 non guru sehingga sampai 31 Desember 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta masih kekurangan SDM sebanyak 5.972 orang atau 54,84%. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kota Yogyakarta.

Gambar 1.2 : SIM Kepegawaian Pemkot



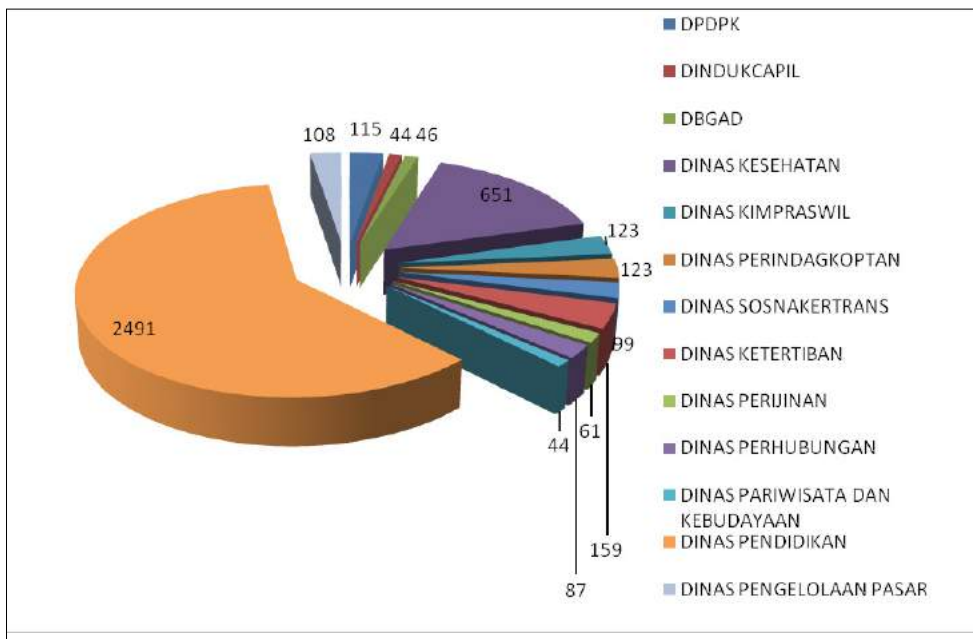
Adapun rincian pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum terlihat sebagai berikut:

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keadaan 31 Desember 2016



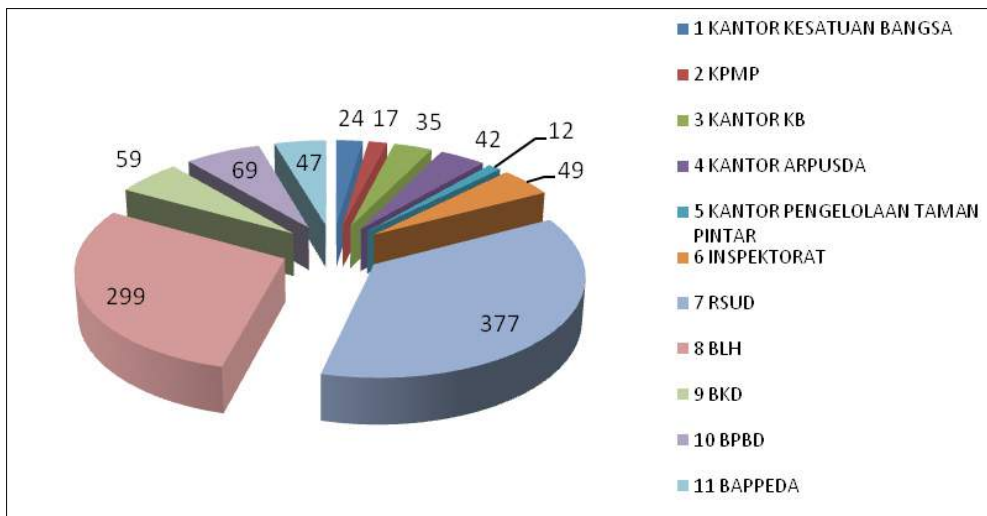
Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik 1.2 : Jumlah Pegawai di Dinas Keadaan 31 Desember 2016



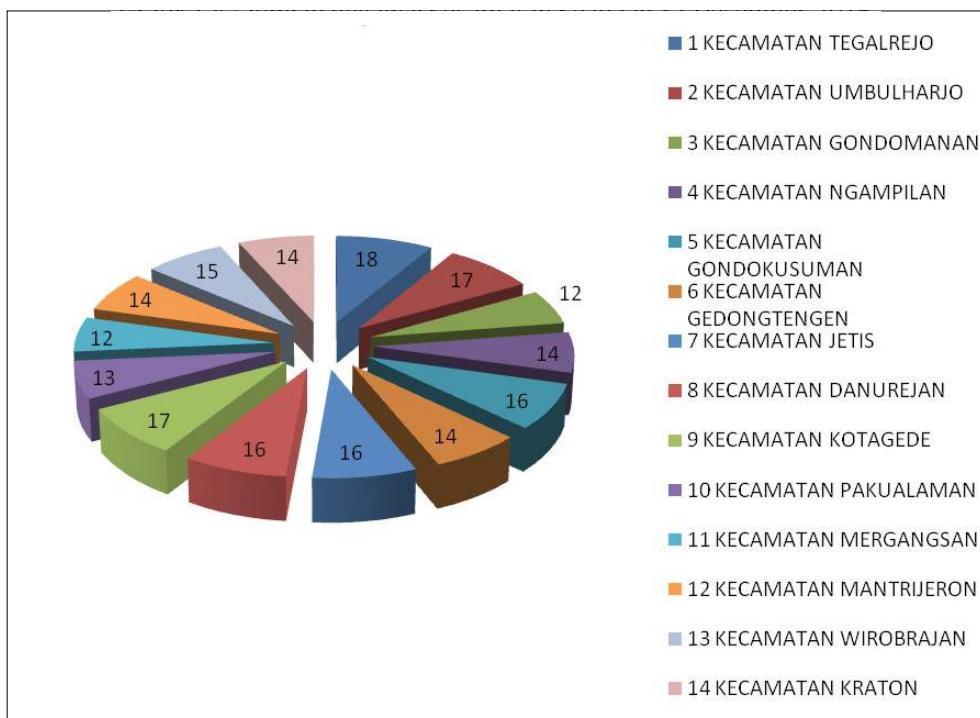
Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik I.3 : Jumlah Pegawai Lembaga Teknis Keadaan 31 Desember 2016



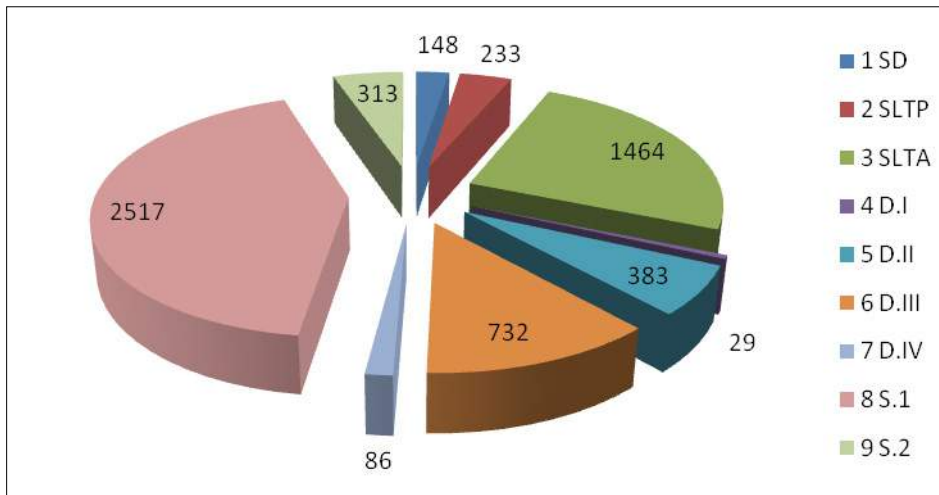
Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik I.4 : Jumlah Pegawai Kecamatan Keadaan 31 Desember 2016



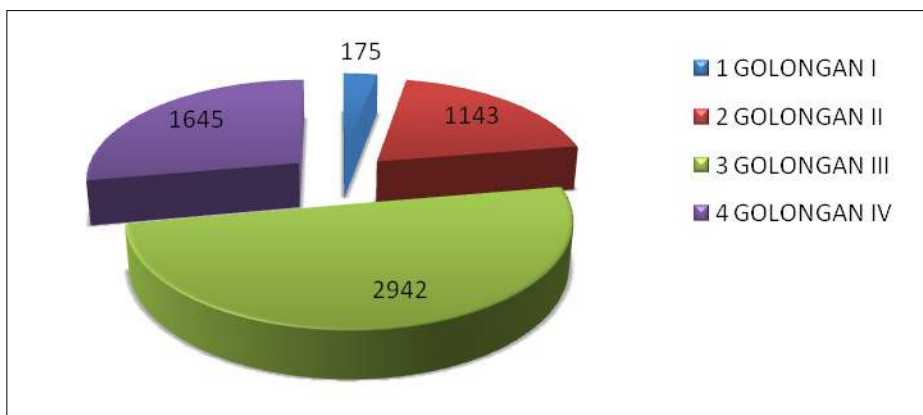
Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik I.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2016



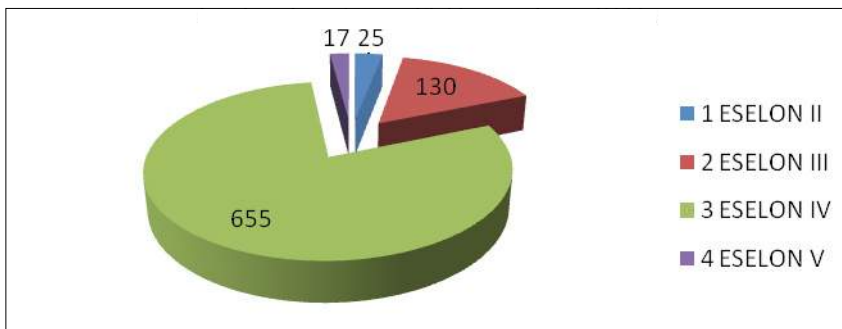
Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik I.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Keadaan 31 Desember 2016



Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

Grafik I.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon Keadaan 31 Desember 2016



Sumber Data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

E. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kota Yogyakarta, isu strategis yang menjadi komitmen bersama untuk terus ditingkatkan adalah melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan amanat gerakan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (*good and clean government*), peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi selain itu merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan serta untuk menjawab desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Reformasi Birokrasi menuntut pula keunggulan komparatif antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder/ masyarakat. Oleh sebab itu, program reformasi birokrasi menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menjadi isu strategis bidang Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (*good and clean government*), peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*/ masyarakat.

Dalam Pelaksanaan dan Pengukuran Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Mendasarkan pada :

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 406/Kep/2013 Tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2016.
2. Pengukuran capaian program Reformasi Birokrasi dilakukan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPMRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan tahun terakhir perodesasi Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2016. Hasil dari indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2016 yaitu 82,98.

Bagan I.2 : Reformasi Birokrasi



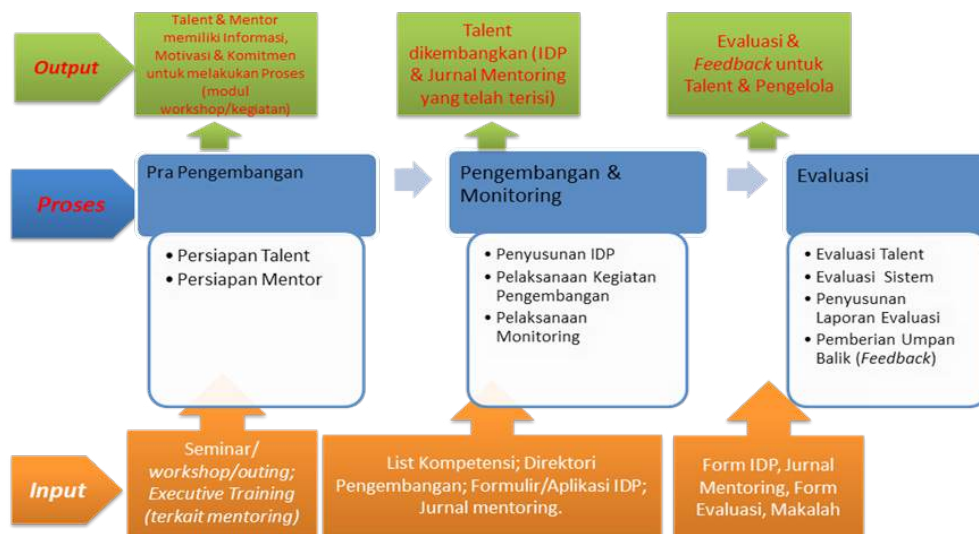
Dasar pelaksanaan MPMRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. MPMRB dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Talent Pool

Dalam rangka mensinkronkan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon pegawai yang akan direkrut, diangkat, ditempatkan, dan dipromosikan pada jabatan tersebut sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 melaksanakan pembangunan *talent pool*. Hal ini senyampang dengan Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pelaksanaan Manajemen ASN harus didasarkan pada *merit system* dan cita-cita dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan SDM ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi

Talent Pool merupakan program strategis untuk memetakan potensi dan kompetensi PNS baik itu PNS yang akan dipromosikan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi maupun Fungsional. Program *Talent Pool* sangat strategis karena mendata profil kompetensi dari kader-kader potensial birokrasi. Dengan *Talent Pool* akan didapatkan sekelompok PNS yang memiliki kompetensi dan kinerja terbaik di setiap organisasi yang selanjutnya dipersiapkan sebagai pemimpin organisasi di masa depan. Adapun Tahapan/Prosedur Pengembangan *Talent* sebagai berikut :

Bagan I.3 : Prosedur Pengembangan Talent



Proses pelaksanaan Pembangunan *talent pool* di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 baru proses rintisan yang dimulai dari tahapan :

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Tim Pembangunan *Talent Pool*,
2. Rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait, Konsultasi ke Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Biro SDM Kementerian Keuangan,
3. Pengusulan uraian ketugasan tentang pengelolaan *Talent Pool*,
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang *Talent Pool* sehingga terbentuk :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2016 tentang Talent Pool Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta

5. Melaksanakan FGD tentang Program *Talent Pool* yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober 2016 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang strategisnya program *talent pool* bagi pengembangan karier PNS, untuk mengetahui implementasi program manajemen talenta di Kementerian Keuangan dan juga meningkatkan pemahaman wawasan khususnya bagi Tim Penyusun Raperwal *Talent Pool* dan Tim Penyusun Sistem Informasi *Talent Pool* PNS di Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Melaksanakan pembangunan rintisan *Talent Pool* melalui suatu Sistem Informasi,
7. Evaluasi dan Pelaporan

3. Saber Pungli



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Satuan Tugas Pungutan Liar yang telah dikukuhkan pada tanggal 6 Desember 2016 dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Yogyakarta.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 511 Tahun 2016 tersebut maka ketugasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, dan satuan kerja yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Sejak dikukuhkan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Yogyakarta telah mengadakan beberapa kali rapat koordinasi bahkan telah menerima sejumlah 6 macam aduan melalui SMS dan surat serta sudah ditindaklanjuti.

4. Bidang Sosial :

a. Pendidikan

Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kegiatan pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta dengan sasaran utama pendidikan Formal. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan inklusi yaitu :

1. Perwal 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No : 188/ 063 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan Pendidikan Inklusi salah satu syaratnya adalah adanya layanan pendukung yang disebut Pusat Sumber / *Resource Center* Pendidikan Inklusi. *Resource Center* ini menjadi pusat rujukan bagi kegiatan pendidikan Inklusi. Di Pusat Sumber ini berkumpul para *stakeholder* Pendidikan Inklusi (Pakar Pendidikan, Pakar PLB, Psikolog, Personil Dinas Kesehatan, Guru, LSM Peduli Difabel, Guru Pendamping khusus). Ketika terjadi kekurangan guru pendamping khusus dan terapis, maka Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Pusat Sumber untuk menyediakan Guru dan terapis.

Beberapa kegiatan pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta Tahun 2016 :

1. Workshop Pendidikan Inklusi Untuk semua Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK dan PKBM/PAUD sejumlah 600 orang.
2. Diklat untuk Guru untuk pendidikan anak lambat belajar pada 6 SD dengan melibatkan pakar pendidikan inklusi dari UNY dan UAD.
3. Bantuan Asesmen untuk 6 Sekolah dengan sasaran 62 siswa yang diduga berkebutuhan khusus.
4. Bantuan fisik pembuatan Ruang Abu Abu di SD Pakel, dan bantuan akses jalan bagi ABK berupa eskalator di SD Taman Muda Ibu Pawiyatan.
5. Bantuan alat musik untuk SD Intish School.
6. *Launching* Pendidikan Inklusi.

b. RS Pratama



Aksesibilitas ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terutama bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta masih menjadi permasalahan utama. Masih muncul kasus masyarakat miskin yang sulit mendapatkan tempat perawatan di rumah sakit. Disamping itu Keterbatasan wewenang pemerintah terhadap rumah sakit swasta menjadi kendala, sehingga

penjaminan ketersediaan tempat perawatan untuk masyarakat miskin menjadi terkendala. Oleh karena itu, pada tahun 2011, Walikota Yogyakarta berinisiatif dan mempunyai komitmen politik untuk membangun rumah sakit umum daerah tanpa kelas, yang selanjutnya diberi nama RS Pratama. RS Pratama merupakan rumah sakit tipe D milik pemerintah Kota Yogyakarta dengan fasilitas pelayanan Kelas III, dengan kemungkinan untuk dikembangkan menjadi tipe C.

Dasar Pembentukan RS Pratama :

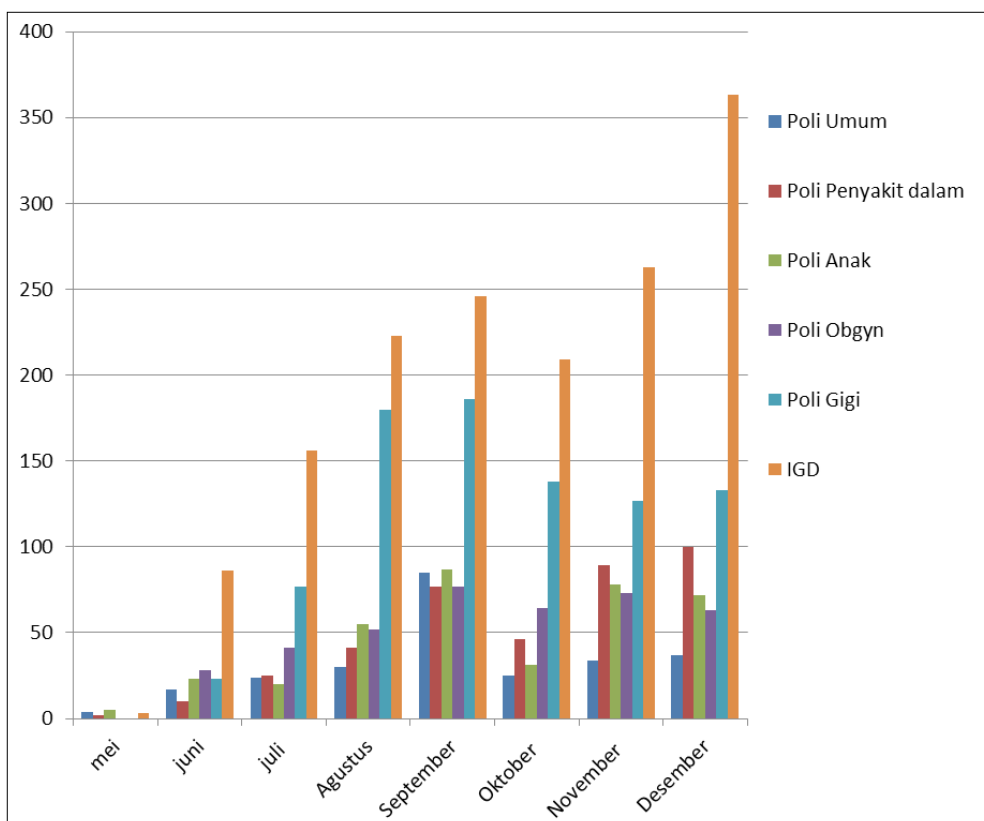
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,

RS Pratama ini mulai operasional pada tanggal 3 Mei 2016 . Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPT RS Pratama secara garis besar digolongkan ke dalam 2 kelompok pelayanan:

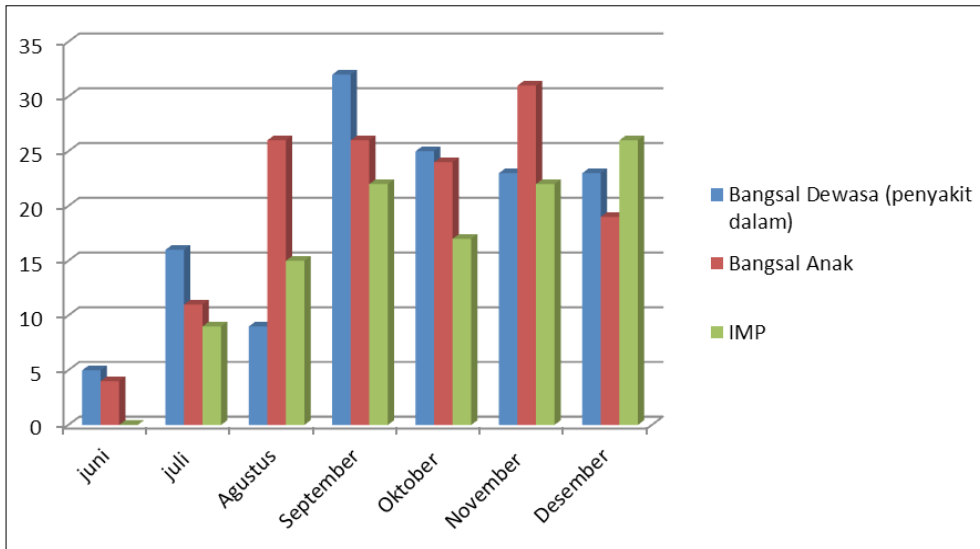
1. Medis dan Keperawatan dengan 3 jenis pelayanan medik spesialis dasar, 1 pelayanan medik spesialistik gigi dan mulut dan 2 pelayanan medik penunjang;
2. Penunjang Pelayanan

Dari Pelayanan kesehatan tersebut dapat dilihat kunjungan rawat jalan dan rawat inap tahun 2016 sebagai berikut :

Grafik 1.8 : Jumlah kunjungan rawat jalan berdasarkan poliklinik tahun 2016



Grafik 1.9 : Jumlah admisi rawat inap berdasarkan jenis bangsal perawatan tahun 2016



F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu tahun 2012-2016. Analisis capaian kinerja tahun 2016 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2016 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.



BAB II

Perencanaan Kinerja





Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2012-2016, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor:

12/NKB.Yk/2015
03/NKB/DPRD/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor:

13/NKB.Yk/2015
04/NKB/DPRD/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

59/NKB.Yk/2016
01/NKB/DPRD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :

60/NKB.Yk/2016
02/NKB/DPRD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 telah ditetapkan pada tanggal 22 maret 2016 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan revisi dan perubahan pada tanggal 10 Nopember 2016 sehubungan adanya perubahan anggaran dan pergantian atau mutasi pejabat. Adapun Revisi Dan Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel II.1 : Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”

No	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B
				Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal	Wajar (WTP)
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi
II	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	2	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74
				Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup	< 102
				Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup	6,7
				Prevalensi Gizi Buruk Dan gizi Kurang	8 %

No	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		3	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit	74	
				Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	80	
		4	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai		Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota	100 %
					Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/ Kota	18 %
					Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir	80 %
					Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran	100 %
					Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana Alam	100 %
		5	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9
					Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK)	94 %
		6	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua		Angka Melek Huruf	98,3 %

No	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				Angka Partisipasi Sekolah (Aps)	97 %
				Persentase Jumlah Sekolah Yang Melayani Pendidikan Inklusi	9,4 %
III	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	7	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp)	Rp 53.739 jt
				Jumlah Koperasi Aktif	481
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)	23.341 UMKM
		8	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	8,40 %
				Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA Dan Kesenjangan Sosial	22,03 %
IV	Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	9	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	80.1-83.0
				Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	99 %
				Angka Pengangguran Terbuka	8.10%-5.75%
		10	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 5,5 %
				Inflasi	6 - 7,5 %
				Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	225-231 Milyar
		11	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Berwawasan lingkungan	Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%

No	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	94 %
				Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota	35,30 %
				Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	100 %
				Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100 %

(sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota YK)

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
1	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	4.592.747.900
2	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	3.394.053.762
3	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	3.298.338.848
4	Program Wajar 12 Tahun	100.835.305,150
5	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	63.228.548.729
6	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1.623.502.164
7	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1.632.413.327
8	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	20.308.352.965
9	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.076.810.173
10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	2.334.288.144
11	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	731.194.130
12	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	10.820.217.900
13	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	700.000.000

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
14	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	65.724.490.180
15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	1.208.600.000
16	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	55.938.804.000
17	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30.877.653.415
18	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	25.964.757.189
19	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	9.441.337.045
20	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	24.520.929.323
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	15.265.481.120
22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	6.803.750.010
23	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	1.526.202.332
24	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.782.483.300
25	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.550.955.000
26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.975.941.300
27	Program Penanggulangan Kemiskinan	1.032.539.220
28	Program Penataan Kawasan Sungai	479.195.700
29	Program Pengembangan Data/Informasi	1.744.333.680
30	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan fasilitas perhubungan	4.840.502.968
31	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	5.769.767.611
32	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	1.051.283.558
33	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	7.964.631.000
34	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.454.532.600
35	Program Konservasi Sumber Daya Alam	613.872.500
36	Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup	3.051.280.200
37	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	7.985.296.045
38	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.487.471.956
39	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	1.275.495.790
40	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	936.398.950

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
41	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1.341.904.000
42	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4.478.407.193
43	Program Rehabilitasi Sosial	7.448.001.909
44	Program Pemberdayaan Sosial	768.206.850
45	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.989.091.400
46	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.447.760.450
47	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1.750.136.750
48	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301.837.000
49	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	785.021.900
50	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	2.043.053.610
51	Program peningkatan ketahanan pangan	3.836.205.270
52	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	1.074.624.130
53	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	503.248.200
54	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.489.540.790
55	Program Peningkatan Perdagangan	2.559.619.140
56	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	6.545.663.189
57	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya	1.713.256.673
58	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	3.940.357.630
59	Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	960.487.450
60	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7.888.732.786
61	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	1.276.242.561
62	Program Fasilitasi Olah Raga	2.897.390.000
63	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	516.840.000
64	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	2.012.619.810
65	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	26.774.000
66	Program Fasilitasi Pertanahan	15.385.443.930
67	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	3.913.691.473

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
68	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	1.699.090.885
69	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtangaan	2.197.937.153
70	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	485.485.000
71	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	990.362.000
72	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	429.635.780
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1.062.320.558
74	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2.294.460.688
75	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	16.661.323.824
76	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	3.086.700.850
77	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3.004.977.918
78	Program Peningkatan Layanan pada DPRD	25.694.148.616
79	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1.865.367.050
80	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3,790.234.050
81	Program Pengembangan Karier pejabat Struktural dan Fungsional	797.940.000
82	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2.315.068.700
83	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	724.084.000
84	Program Pengelolaan Barang Daerah	3.646.457.178
85	Program Peningkatan Barang Daerah	30.565.314.554
86	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	71.037.350.827
87	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1.039.952.465
88	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	444.297.319
89	Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku	1.150.919.419
90	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	7.404.152.800
91	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	2.791.853.575
92	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	7.525.245.000

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
93	Program Peningkatan Ketaatan Hukum	1.313.435.000
94	Program Perlindungan Masyarakat	1.850.902.600
95	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	5.902.116.000
96	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	5.367.110.775
97	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	803.102.316
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	1.981.591.100
99	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	656.686.720
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	1.465.342.095
101	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	491.741.929
102	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	2.410.035.000
103	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	572.302.608
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1.703.918.500
106	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedontengen	353.396.607
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	918.285.000
108	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	173.561.395
109	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	768.576.850
110	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	379.923.365
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	889.601.545
112	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	552.951.682
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1.398.819.586
114	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	368.543.019

No.	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2016
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	1.884.898.800
116	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	463.710.200
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	1.568.198.668
118	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	464.519.960
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1.034.107.660
120	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	316.028.215
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	1.551.190.800
122	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	794.195.437
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	4.020.835.550
124	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	351.805.255
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	1.508.505.454
126	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	2.214.967.360
127	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.056.090.452
128	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	2.999.037.684
129	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	928.875.894
130	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	989.962.881
131	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	8.188.054.238
132	Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi	13.846.049.191
133	Program Pengembangan Pasar	2.856.517.071

(sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota YK)



BAB III

Akuntabilitas Kinerja





A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B	BB	100%
		Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal	Wajar (WTP)	Wajar (WTP)	-
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi	Sangat Tinggi	-
II	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74	74	100%
		Angka Kematian Ibu Per seratus ribu Kelahiran Hidup	<102	104,14	97,90%
		Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup	6,7	7,81	83,43%
		Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	8%	9,05%	86,88%
III	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit	74	77,52	104,75%
		Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	80	78,67	98,34%
IV	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	69,41%	69,41%
		Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota	18%	22,18%	123,28%
		Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir	80%	77,98%	97,48%
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100%	100%
V	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9	79,51	106%
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (Upik)	94%	96,77%	102,95%
VI	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97%	94,92%	97,86%
		Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9,4%	11,96%	127,23%
		Angka Melek Huruf	98,30%	99,92%	101,65%
VII	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp)	Rp. 53.739 jt	Rp 54.306 jt	100%
		Jumlah koperasi aktif	481	469	97,51%
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	23.341 UMKM	23.468 UMKM	101%
VIII	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Angka kemiskinan	8,40%	8,75%	95,83%
		Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial	22,03%	21,01%	104,85%
IX	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	80,1 - 83,0	84,56	102%
		Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	99%	98,67	99,67%
		Angka Pengangguran terbuka	8,10 - 5,75%	5,52	105%
X	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 5,5%	5,16%	99,23%
		Inflasi	6 - 7,5 %	4,06%	132,33
		Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	225 - 231 Milyar	376.170.979.336	162,84%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
XI	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	102,17	102,17%
		Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	94%	98,55	104,84%
		Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota	35,30%	33,77%	95,68%
		Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	100%	79,73%	79,73%
		Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%	79,73%	79,73%

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran II. Adapun analisis capaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih" dan juga untuk mencapai tujuan: "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Untuk mengukur sasaran pertama ini ada 3 (tiga) indikator sasaran. Pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas tersaji pada Tabel III.3. berikut dibawah ini:

Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	CC	CC	B	BB	B	BB	100%
2.	Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	Wajar	Masih dalam Proses	
3.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
Rata-rata Capaian Kinerja								-

Terlihat dari Tabel III.3 diatas pada sasaran pertama ini indikator sasaran Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal belum dapat diketahui hasilnya pada saat Laporan Kinerja Tahun 2016 disusun. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut masih dalam proses penilaian dari Pemerintah pusat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

► 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta



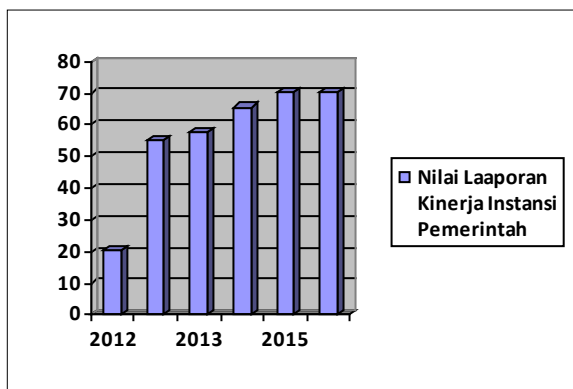
Gambar III.1 : Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemkot Yogyakarta

Tabel III.4 : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Nilai Tahun 2012	Nilai Tahun 2013	Nilai Tahun 2014	Nilai Tahun 2015	Nilai Tahun 2016
Nilai Hasil Evaluasi	55,17	57,68	65,57	70,11	70,26
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	BB	BB
Kinerja	(>50 - 60)	(>50 - 60)	(>60 - 70)	(>70 - 80)	(>70 - 80)
Interpretasi	Cukup	Cukup	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dibandingkan tahun 2015 nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Grafik III.1 : Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



➤ 2. Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

Opini Laporan Keuangan tahun 2016 oleh auditor eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 hasil audit BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

➤ 3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan nilai dari Tim Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY Terhadap Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh skor sebesar 3,5269 sedangkan nilai akhir dari Tim Nasional Belum ditetapkan sehingga peringkat tingkat nasional belum dapat diketahui. Demikian penilaian LPPD Tahun 2016 sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun belum diketahui hasilnya karena masih dalam proses penilaian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

- ✓ Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal penyusunan dokumen pelaporan daerah ;
- ✓ Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah;
- ✓ Dukungan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan data laporan daerah.

Hambatan/Masalah :

- ✓ Hasil evaluasi Laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau *feedback* dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya;
- ✓ Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses/menginput data terkadang masih lamban;
- ✓ Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama (3 bulan) sehingga setelah tahun anggaran berakhir belum dapat diketahui hasil audit laporan keuangan.

Strategi / upaya pemecahan masalah:

- ✓ Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja, perlu pendampingan yang dilaksanakan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sedangkan penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran Strategis 2**Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu **"Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas"** dan tujuan **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ada 4 (empat) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94,86% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,5	73,5	73,5	73,5	74	74	100%
2	Angka Kematian ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup	7 (150,3/100.000 KH)	204,3	45,78	125,88	102	104,14	97,90%
3	Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup	45 (10.9/1000)	51 (11,57/1000KH)	14,19	8,31	6,7	7,81	83,43%
4	Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang	7.95%	7.33%	7,93%	7,97%	8%	9,05%	86,88
Rata-rata Capaian Kinerja								92,05%

➤ 1. Angka Harapan Hidup



Gambar III.2 : Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama dan semakin buruk kesehatan akan semakin dekat dengan kematian walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Angka harapan hidup di Kota Yogyakarta merupakan angka harapan hidup tertinggi di kota Indonesia yaitu 74 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan target Nasional yaitu 72,5 tahun. Kondisi tersebut akan selalu dipertahankan.

➤ 2. Angka Kematian Ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

Kematian ibu maternal adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016 sebesar 104.14 menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 125.88. Kematian ibu tahun 2016 sejumlah 4 kasus dari 3841 kelahiran hidup menurun dibandingkan dengan Jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 5 ibu dari 3.972 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target nasional 306 capaian indikator Angka Kematian Ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup sudah memenuhi target nasional. Kasus kematian tersebut secara medis disebabkan oleh pendarahan, HIV, penyakit jantung dan 1 (satu) kasus lainnya belum dapat diketahui penyebabnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kedepannya

akan diupayakan penurunan Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta.

➤ 3. Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (12 bulan), dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2016 sebesar 7,81 bayi per 1000 kelahiran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,31 bayi per 1000 kelahiran hidup, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan melaksanakan program. Namun dibandingkan target pada tahun 2016 kematian bayi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan target nasional 24 capaian indikator Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup sudah memenuhi target nasional. Jumlah kematian bayi pada tahun 2016 sebanyak 30 kasus sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 33 kasus.

➤ 4. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang



Gambar III.3 : Pelayanan Perbaikan Gizi di Kelurahan

Prevalensi balita gizi buruk & balita gizi kurang Tahun 2016 sebesar 9,05 % dari yang ditargetkan sebesar 8,00%. Capaian indikator ini mengalami penurunan dibandingkan capaian pada Tahun 2015. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kasusnya mengalami kenaikan dari 1.234 jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang pada Tahun 2015

dan pada Tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 1.364 kasus. Bila dibandingkan dengan target nasional < 10% capaian indikator prevalensi gizi buruk dan gizi kurang sudah memenuhi target nasional. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk, antara lain melalui pendirian Rumah Pemulihan Gizi sebagai pemberian layanan komprehensif dalam penanganan masalah gizi di Kota Yogyakarta dan pemantauan status gizi balita di Posyandu.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Adanya Rumah Pemulihan Gizi (RPG) yang memberikan pelayanan pemulihan terhadap balita gizi kurang & buruk.
- ✓ Adanya pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir
- ✓ Pemberian bantuan stimulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi bumil dan balita gizi buruk memberikan dampak pemulihan terhadap kondisi ibu hamil dan balita yang mengalami penurunan gizi.
- ✓ Implementasi Ante Natal Care (ANC) berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
- ✓ Akses ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan lain sangat mudah
- ✓ Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku Kesehatan Ibu Anak untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami

Hambatan/masalah :

- ✓ Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna
- ✓ Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
- ✓ Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal
- ✓ Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
- ✓ Tingginya remaja putri dan ibu hamil yang anemia (>25%) yang merupakan faktor resiko terjadinya berat bayi lahir rendah (BBLR)
- ✓ Kurangnya sarana NICU di fasilitas kesehatan rujukan
- ✓ Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif
- ✓ Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.

- ✓ Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 (dua) ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
- ✓ Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor-faktor ini merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
- ✓ Sosialisasi P4K (Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Penanganan Komplikasi) yang digerakkan oleh kader pendamping ibu hamil masih belum optimal sehingga masih memungkinkan terjadi kematian ibu melahirkan.
- ✓ Adanya kasus persalinan dirumah.
- ✓ Tingginya ibu hamil dengan faktor resiko (Anemia, Kekurangan Energi Kronis, penyakit penyerta lainnya)
- ✓ Sistem manual rujukan maternal neonatal belum berjalan dengan optimal
- ✓ Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana kurang optimal.

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Optimalisasi implementasi Manual Rujukan
- ✓ Meningkatkan peran regulasi dalam meningkatkan kemampuan Rumah Sakit
- ✓ Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu, SMS bunda
- ✓ Memperkuat jejaring rujukan dengan group *WhatsApp*
- ✓ Mengoptimalkan peran YES 118 untuk melayani ibu hamil beresiko.
- ✓ Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan
- ✓ Meningkatkan promosi kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak
- ✓ Mengoptimalkan peran kader pendamping bumil di wilayah
- ✓ Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam mendukung program kesehatan

- ✓ Implementasi Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif
- ✓ Menciptakan suasana yang mendukung program ASI di Fasilitas kesehatan & di masyarakat.
- ✓ Melakukan penjarangan kasus anemia & Kekurangan Energi Kronis (KEK) sejak remaja , calon pengantin dan wanita usia subur
- ✓ Penyuluhan Gizi seimbang kepada masyarakat
- ✓ Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan wanita usia subur.
- ✓ Meningkatkan kepesertaan KB aktif.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "**Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas**" dan tujuan "**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**". Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Jogja. Untuk mengukur sasaran ke tiga tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101.11% atau kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	75,72	75,97	76,81	76.21	74	77.09	104.18%
2	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	81	77	75,98	78.24	80	78.24	98.05%
Rata-rata Capaian Kinerja								101.11%

Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

➤ 1. Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit



Gambar III.4 : Pelayanan Rumah Sakit



Gambar III.5 : Pelayanan Rawat Inap

RSUD Kota Yogyakarta telah berhasil merebut hati para pelanggannya untuk menjadikan RSUD Kota Yogyakarta sebagai pilihan utama dalam pelayanan perumahasakitan Indeks kepuasan layanan rumah sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal (*Customer*) yang diselenggarakan oleh tim survey kepuasan pelanggan eksternal RSUD Kota Yogyakarta selama 2 (dua) kali dalam Tahun 2016 (persemester). Hasil survey kepuasan pelanggannya pada semester I adalah 77,52 dan pada semester II hasilnya sedikit menurun yaitu 77,09. Hal ini diyakini karena banyaknya renovasi dan pembangunan selama Tahun 2015 yang sedikit mengganggu kenyamanan pasien/pengunjung. Banyaknya kegiatan fisik tersebut tetap harus dilakukan demi mewujudkan standar fasilitas sesuai dengan persyaratan rumah sakit rujukan regional dan RS Pendidikan. Meskipun hasil survey kepuasan pelanggan pada semester II mengalami penurunan namun masih diatas target yang ditetapkan diawal tahun. Hasil pengukuran capaian kinerja pada akhir Tahun 2016 masih baik karena mencapai 104,18% dari target.

➤ 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan



Gambar III.6 : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung telah dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan bagi pengguna layanan Puskesmas, dan Hasil survey tersebut diolah dan hasilnya

adalah Indeks Kepuasan kesehatan.

Indeks hasil survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas oleh pihak ketiga di Tahun 2015 sebesar 78,2, dan mengalami kenaikan sebesar 0,47 dibandingkan Tahun 2016. Namun demikian nilai 78,67 sudah dikategorikan baik karena masuk dalam skala nilai 62,51 – 81,25.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut :

- ✓ Pemerintah Kota Yogyakarta sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik karena adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, serta penyediaan alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas maupun di RSUD yang semakin lengkap dan canggih dengan tujuan memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan kesehatan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Kota Yogyakarta telah menambah SDM kesehatan dan non kesehatan (selain PNS dan Naban) sebagai pegawai BLUD serta tenaga mitra;
- ✓ Penambahan tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan mengangkat tenaga kontrak medis, paramedis dan administrasi;
- ✓ Pengembangan manajemen mutu di 18 Puskesmas terkait tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Unit Daerah dan akreditasi puskesmas di 4 puskesmas;
- ✓ Pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas (medis dan paramedis) oleh dokter spesialis yang dilaksanakan secara terintegrasi antar program;
- ✓ Pelayanan anak kebutuhan khusus di RSUD dilengkapi dengan konsultasi psikologi klinis, terapi wicara dan okupasi terapi;
- ✓ Pelayanan konsultasi psikologi klinis dan Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer di Puskesmas;
- ✓ Standar mutu istiyankes dan instrumen monitoring mutu istiyankes telah disusun untuk pemantauan mutu pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin;

- ✓ Pemberian Pelayanan Kegawatdaruratan medis secara cepat melalui Kegiatan YES 118 oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan RS pemerintah maupun RS swasta agar dapat mempercepat akses menuju pelayanan kesehatan;
- ✓ Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kekurangan kuota dari Jamkesos dan Jamkesmas bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang bermanfaat untuk rawat jalan dan rawat inap di RS Pemerintah dan RS swasta serta adanya kesadaran masyarakat miskin untuk berobat ke pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan jaminan kesehatan kepada warga yang ber-KTP Kota Yogyakarta yang tidak tercover dalam jaminan kesehatan apapun. pelaksanaan kegiatan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta direncanakan akan menuju *universal coverage*;
- ✓ Perbaikan kondisi Sarana dan Prasarana di Puskesmas semakin membaik;
- ✓ Penambahan tenaga dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui pengangkatan tenaga kontrak baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi;
- ✓ Pengembangan kegiatan manajemen mutu di Puskesmas maupun administrasi BLUD di 18 Puskesmas;
- ✓ Puskesmas dan RSUD melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB dengan cepat;
- ✓ Petugas surveilans kelurahan segera mendatangi ke wilayah ketika ada informasi.
- ✓ Perbaikan sistem pelaporan, sistem komunikasi, sistem jejaring dan sistem alert.
- ✓ Dukungan perbaikan Aplikasi SIMPUS dan Google Drive
- ✓ Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB secara cepat

- ✓ Jejaring surveilans RS, surveilans Puskesmas , surveilans Kelurahan dan kader berjalan baik.
- ✓ Petugas surveilans Kelurahan segera mendatangi ke wilayah ketika ada informasi.

Hambatan/masalah :

- ✓ Regulasi yang mengatur tarif layanan yang sudah kadaluarsa, namun masih diberlakukan karena Perwal Tarif baru masih dalam proses pembahasan (saat ini yang masih berlaku adalah tarif tahun 2009 yang menggunakan dasar perhitungan tahun 2008).
- ✓ Regulasi yang mengatur tatakelola rumah sakit yaitu Perwal *Hospital By Laws* masih dalam proses penetapan.
- ✓ Struktur organisasi baru saat ini masih dalam tahap prolegda (dalam proses legislasi) sehingga RSUD Kota Yogyakarta masih dengan struktur organisasi lama. Sementara itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terkait institusi rumah sakit pemerintah yang berubah statusnya menjadi UPT (masih dalam taraf pembahasan ulang di tingkat pusat) berimbas pada tertundanya proses legislasi struktur di RSUD Kota Yogyakarta.
- ✓ Terbatasnya ruangan untuk mengelola arsip atau berkas yang masih aktif atau inaktif.
- ✓ Belum terpenuhinya standar pelayanan RS kelas B baik dari sisi sarana prasarana alat medis maupun SDM.
- ✓ *Incenerator* sementara ini belum dapat dimanfaatkan oleh faskes lain seperti Puskesmas.
- ✓ Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Sosial dan Jaminan Kesehatan Daerah bagi penduduk Kota Yogyakarta yang dilayani di Puskesmas menyebabkan terjadi lonjakan kunjungan/pasien (kunjungan/pasien menjadi banyak) sementara jumlah SDM terbatas, sehingga waktu tunggu terasa lebih lama dan pasien merasa kecepatan pelayanan menjadi agak lambat, kondisi lingkungan juga menjadi kurang nyaman. Indikator Indeks kepuasan pelanggan yang nilai rata-rata nya rendah/turun dari tahun sebelumnya adalah kecepatan pelayanan dan kenyamanan.

Strategi / upaya pemecahan permasalahan :

- ✓ Mempercepat penyelesaian penetapan tarif baru.
- ✓ Berkoordinasi lebih intensif dengan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta agar Struktur Organisasi dan Hospital By Laws segera disahkan.
- ✓ Setelah satu tahun menyewa, pada Tahun 2016 RSUD Kota Yogyakarta telah menguasai area seluas 1.500 m2 yang terletak di samping selatan rumah sakit dan telah dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan yang proses pengadaannya melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
- ✓ Tindak lanjut *Review Overall Planning/Master Plan*.
- ✓ Pemanfaatan Gedung Azalea (Blok H) secara maksimal.
- ✓ Pemanfaatan Ex-ruang: Bangsal Kenanga lama untuk *CathLab* dan Ruang *endoscopy-colonoscopy*; bangsal Cempaka lama untuk ruang kemoterapi, serta bangsal Kanna dan Padma lama untuk Klinik Eksekutif.
- ✓ Upaya Promosi, Pemasaran, dan Pelayanan Pelanggan
- ✓ Penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Puskesmas berbasis sistem *online*.

Sasaran Strategis 4***Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai***

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu: Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran ke-4 (empat) tersebut ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98.03% atau kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukurannya terilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel III.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	91,53%	66,13%	69,01%	100%	69,41%	69,41%
2	Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota	12,5%	14,79%	22,19%	22,17%	18%	22,18%	123,28%
3	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir	68%	71,72%	77,30%	75,92%	80%	77,98%	97,48%
4	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja								98,03%

Terlihat dari tabel di atas bahwa sasaran ini telah menunjukkan capaian yang sangat tinggi dikarenakan Pemerintah Kota sangat berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai bagi masyarakatnya.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ 1. Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Infrastruktur drainase yang dikelola sepanjang 344.960 m dan cakupan infrastruktur yang harus dibangun sepanjang 497.000 m. Cakupan pada indikator tersebut baru mencapai 69,41% karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan sistem drainase dilakukan secara bertahap. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar III.7 : Sistem Drainase Skala Kota

➤ 2. Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 adalah 443.421 jiwa. Dari jumlah tersebut yang terlayani oleh cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota adalah 98.350 jiwa. Dengan demikian target yang hanya 18% di Tahun 2016 telah terlampaui. Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota untuk Tahun 2013 telah terealisasi sebesar 14,79%, untuk Tahun 2014 terealisasi sebesar 22,19%, pada Tahun 2015 terealisasi sebesar 22,17% .dan tahun 2016 terealisasi sebesar 22,91%. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sasaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah yang tidak benar. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu: Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Saluran Air Limbah, Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air Limbah, Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi.

➤ 3. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui hasil penimbangan sampah yang dibuang di TPA Piyungan dengan menghitung rata-rata pembuangan sampah per hari. Capaian Kinerja sasaran Tahun 2016 sekaligus capaian akhir periode Renstra 2012-2016 menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu 97,48% Dari hasil perhitungan Tahun 2016 rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan sebesar



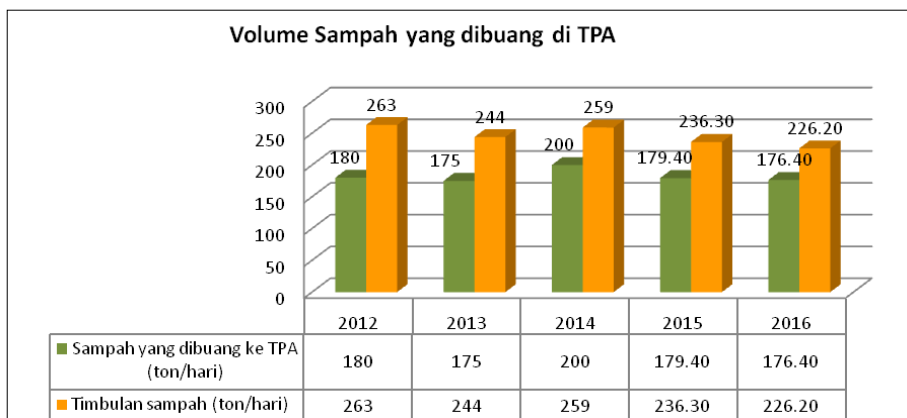
Gambar III.8 : Depo Sampah

176,4 ton/hari setara dengan 77,98 timbunan sampah di Kota Yogyakarta. Timbunan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2016 diperhitungkan sebesar 226,2 ton/hari diperoleh dari indeks SNI 19-3694-1994 adalah 0,5 kg/orang/hari.

Rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 179,4 ton/hari menjadi 176,4 ton/hari pada Tahun

2016. Hal ini disebabkan karena rata-rata timbunan sampah di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 236,3 ton/ hari menjadi 226,2 ton/hari.

Grafik III.2 : Volume sampah yang di buang ke TPA



► 4. Persentase pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran



Gambar III.9 : Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran

Upaya Pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan tingkat capaian penyelesaian kasus kebakaran tertangani 100%. Dalam penanganan kasus tersebut Pemerintah kota Yogyakarta menetapkan tingkat *Respon Time* yaitu waktu yang diperlukan oleh unit/regu pemadam kebakaran dari mulai diterimanya laporan kejadian

kebakaran sampai siap melaksanakan tugas pemadaman di lokasi kebakaran. Target yang ditentukan untuk tahun 2016 adalah Tercapainya *respon time* 11 menit. Persentase pencapaian *respon time* sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra 2012-2016) sehingga pengukuran yang dilakukan juga berdasarkan indikator tersebut. Berdasarkan laporan kebakaran selama tahun 2016 terjadi 63 kali kejadian kebakaran di dalam wilayah kota Yogyakarta dan 60 kali kejadian kebakaran diluar Kota Yogyakarta. (Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulon Progo). Waktu tempuh rata-rata di wilayah Kota Yogyakarta untuk sampai ke lokasi adalah 11 menit maka pencapaian target *respon time* pemadaman kebakaran telah tercapai.

➤ 5. Persentase Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam

Indikator sasaran pertama yaitu cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam yaitu kasus bencana yang tertangani dalam waktu tanggap dibanding jumlah kasus bencana. Waktu tanggap penanganan bencana belum bisa ditentukan karena SPM penanggulangan bencana belum ditetapkan. Meskipun belum ada standar waktu tanggap penanganan bencana, BPBD Kota Yogyakarta secepatnya akan melaksanakan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana sehingga tidak sampai ada korban jiwa dan meminimalkan korban harta benda. BPBD Kota Yogyakarta dibentuk pada tanggal 1 Januari 2013 dan tugas pokok dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi namun sifatnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi non permanen, Rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilaksanakan dengan kerjasama SKPD terkait. Selama tahun 2016 terjadi bencana sebanyak 60 kali dan korban yang perlu di evakuasi sifatnya sementara dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini :

- ✓ Adanya dukungan dari program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan operasional pengangkutan sampah yang menghasilkan output jasa pengangkutan sampah baik melalui pihak ketiga maupun swakelola.
- ✓ Adanya dukungan dari kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang menghasilkan output pengadaan gerobak sampah, bak kontainer sampah dan pembangunan transfer depo sampah yang berada di Serangan.

- ✓ Adanya penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA sehingga timbunan sampah mengalami penurunan.
- ✓ Dalam penanggulangan bencana alam telah dipasang alat peringatan dini early warning sistem (EWS) di sepanjang sungai code, sungai winongo dan sungai gajah wong serta pemasangan 2 alat telemetri (alat pengukur ketinggian air sungai). Pemerintah Kota juga memiliki pos pantau banjir di Dusun Ngentak Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kota di bantu oleh komunitas tanggap bencana yang ada di Kota Yogyakarta.
- ✓ Peningkatan kapasitas komunitas tanggap bencana dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana;
- ✓ Dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta, dibentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB). Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sudah terbentuk 75 Kampung Tangguh Bencana (KTB);
- ✓ Kesadaran warga yang cukup tinggi dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana umum yang ada.

Hambatan/masalah :

- ✓ Saluran yang ada dimensinya sudah tidak mencukupi untuk kondisi sekarang
- ✓ Banyaknya utilitas bawah tanah yang melintang maupun memanjang di dalam SAH (kabel, pipa dll)
- ✓ Lalu Lintas yang semakin padat sehingga menghambat laju perjalanan mobil pemadam kebakaran dan adanya lintasan pintu kereta api yang mengurangi kecepatan dalam menangani bencana;
- ✓ Lokasi yang sulit dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran;
- ✓ Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat bencana alam dan kebakaran.

Strategi /upaya penyelesaian masalah:

- ✓ Pembangunan sistem drainase dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran
- ✓ Melaksanakan penyuluhan, simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana alam kepada masyarakat, sekolah maupun dunia usaha;
- ✓ Membentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana;
- ✓ Melaksanakan monitoring terhadap daerah rawan bencana;
- ✓ Memperbaiki sistem pengelolaan, serta meningkatkan pengelolaan sampah mandiri dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di masyarakat guna mengurangi timbulan sampah dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA;
- ✓ Meningkatkan kualitas transfer depo dan TPS dengan pengatapan untuk mengurangi bau yang ditimbulkan oleh sampah apabila teguyur air hujan;
- ✓ Meningkatkan monitoring dan pengawasan untuk mengurangi sampah menginap dan titik pembuangan sampah liar;
- ✓ Menambah dan meremajakan armada pengangkutan sampah;
- ✓ Dibutuhkan koordinasi untuk pembentukan kelompok komunal dengan lingkup yang lebih luas;
- ✓ Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan;
- ✓ Mengoptimalkan personil yang ada dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan komunitas bencana;
- ✓ Melibatkan Instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi;
- ✓ Penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana dan kebakaran kepada masyarakat dan anak sekolah;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik Yang Baik

Sasaran strategis 5 ini pun merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik". Pencapaian misi ini didukung oleh Bagian Organisasi dan Bagian Humas Untuk mengukur sasaran ke lima tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 104,47% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik sebagai berikut:

Tabel III.8 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,41	74,29	75,94	77,84	74,9	79,51	106%
2.	Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	93,65%	95,74%	97,46%	95,25%	94%	96,77%	102,95%
Rata-rata Capaian Kinerja								104,47%

➤ 1. Indeks kepuasan Masyarakat

Seiring dengan penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat, maka istilah indeks kepuasan masyarakat berubah menjadi survey kepuasan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Khusus untuk bidang pendidikan, pengukuran survey kepuasan masyarakat diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengukuran SKM bidang Lembaga Pendidikan Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut terjadi perubahan substansi yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD/Unit Kerja dapat menggunakan metode sesuai dengan kaidah penelitian dan penentuan sampel dapat dilakukan secara

proporsional berdasarkan jumlah populasi. Selain itu hasil Survey kepuasan masyarakat wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi, website yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan mulai tahun 2011 pada 128 layanan, Tahun 2012 dilaksanakan 259 layanan, Tahun 2013 pada 326 layanan, Tahun 2014 pada 276 layanan, Tahun 2015 dilaksanakan pada 356 jenis layanan dan pada Tahun 2016 dilaksanakan pada 284 layanan. Adapun capaian hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 79,51. Jumlah Layanan yang dilakukan pengukuran survey Kepuasan masyarakat di Pemkot Yogyakarta setiap tahun mengalami perubahan dikarenakan perubahan jenis layanan terhadap obyek yang dilakukan pengukuran survey kepuasan masyarakat.

➤ 2. Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)



Gambar III.10 : Website UPIK

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) merupakan salah satu ketugasan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pesan dari masyarakat berbasis teknologi informasi berupa keluhan, pertanyaan, informasi, maupun

usul saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja birokrasi yang responsif dan transparan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta menuju good governance.

Selain itu UPIK merupakan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kota Yogyakarta manakala mengetahui indikasi tindak korupsi. Masyarakat dapat menyampaikan pesan ke UPIK melalui SMS 08122780001, telepon/fax (0274)561270, surat maupun datang langsung ke Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Unit ini tidak sekedar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya hotline service yang memiliki kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan serta usul saran masyarakat, selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada setiap dinas

atau unit kerja untuk memberi jawaban atau tidak lanjutnya. UPIK juga memberi informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan masukan yang ada. Pesan yang masuk ke UPIK akan diverifikasi admin selanjutnya disampaikan ke SKPD sesuai isi pesan untuk memberi jawaban. Jumlah pengaduan Tahun 2016 sebanyak 4082 dan jumlah pengaduan yang direspon sebanyak 3951.

Keberhasilan pencapaiannya sasaran :

- ✓ Keberadaan UPIK memberi kemudahan kepada masyarakat baik warga kota maupun siapapun juga untuk menyapaikan keluhan usul saran kepada Pemkot Yogyakarta secara mudah cepat dan sedehana;
- ✓ Keberadaan UPIK ini juga memberikan kemudahan dalam pengawasankinerja setiap SKPD, unit kerja tidak responsif dalam pelayanan masyarakat;
- ✓ Database Pesan yang masuk dapat digunakan instansi terkait untuk menentukan agenda dan prioritas kerjanya;
- ✓ Keberhasilan UPIK sudah banyak menarik kabupaten/kota lain untuk menduplikasi atau mengadopsi sistem ini, UPIK digunakan sebagai model layanan publik yang mudah, murah dan sederhana;
- ✓ Adanya kebijakan pengukuran survey kepuasan masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan dan Puskesmas 2 kali setahun;
- ✓ Peningkatan pelayanan yang diberikan SKPD pelayanan publik;
- ✓ Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan SKPD pelayanan publik.

Hambatan/Kendala :

- ✓ Persepsi masyarakat terhadap tindak lanjut UPIK sangat tinggi, penyelesaian pengaduan melalui UPIK diharapkan dapat sampai ke tingkat action di lapangan, dengan mengadu ke UPIK warga berharap penyelesaian masalah setuntasnya. Banyak warga menganggap bahwa layanan UPIK ini dilaksanakan selama 24 jam oleh operator, sehingga warga kadang mengharap jawaban yang "realtime" padahal sebagai sistem yang berbasis komputer, pesan yang masuk ke UPIK perlu diverifikasi dahulu oleh admin. Warga mengharap juga dalam pengiriman pesan ke UPIK tidak dibebani biaya pulsa atau bebas pulsa.
- ✓ Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat kurang relevan apabila di terapkan SKPD tertentu.

Strategi pemecahan masalah :

- ✓ Kota secara berkala melakukan sosialisasi akses upik, mekanisme alur pesan UPIK dan penyelesaian pengaduan masyarakat sampai tingkat Kelurahan dengan menghadirkan perwakilan warga;
- ✓ Melakukan evaluasi hasil pengukuran SKM;
- ✓ Bimtek dan pendampingan dalam penyusunan SKM.

Sasaran Strategis 6**Terwujudnya Pendidikan Inklusif Untuk Semua**

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Pendidikan. Untuk mengukur sasaran ke-6 (enam) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 108,91% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua yaitu:

Tabel III.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Melek Huruf	98%	98,10%	98,27%	99,75%	98,30%	99,92%	101,65%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	91%	92%	93,60%	94,64%	97%	94,92%	97,86%
3	Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi	8,25%	8,24%	9,40%	10,45%	9,4%	11,96%	127,23%
Rata-rata Capaian Kinerja								108,91%

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

➤ 1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf/Aksara adalah proporsi penduduk usia 15-60 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus memahami makna apa yang dibaca atau ditulis tersebut terhadap penduduk usia 15 – 60 tahun.

Angka melek huruf diperoleh dari :

$$\text{Angka buta huruf} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-60 th yang buta huruf} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk usia 15-60 tahun}}$$

$$\text{Angka buta huruf} = \frac{323 \times 100\%}{278.450}$$

$$\text{Angka buta huruf} = 0,08\%$$

Dengan demikian angka melek huruf di Kota Yogyakarta dapat kita tentukan sebagai berikut = $100\% - 0,08\% = 99,92\%$.

Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2016 ditargetkan 98,30% dan realisasi tercapai sebesar 99,92% menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,65%. AMH Kota Yogyakarta secara keseluruhan lebih tinggi dibanding dengan AMH di tingkat DIY maupun tingkat Nasional seperti terlihat pada tabel ini :

Tabel III.10 : Perbandingan Angka Melek Huruf

No	Angka Melek Huruf (AMH)	Tahun 2016	Tahun 2015	
		Kota Yogyakarta	DIY	Nasional
1	Usia > 15 Tahun	99,92%	94,50%	95,22%

Sumber : BPS

► 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Gambar III.11 : Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah, dalam hal ini dibatasi pada usia 7 – 18 tahun. APS juga merupakan salah satu indikator dasar yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah memberi akses kepada warganya khususnya usia sekolah mengenyam pendidikan, baik

formal maupun non formal.

Angka partisipasi sekolah di tahun 2016 di targetkan sebesar 97%, ternyata realisasi mencapai 94,92% menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,86 %, artinya apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 menunjukkan ada peningkatan sebesar 0,28 %. APS Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan

lebih tinggi dibanding APS di tingkat DIY maupun tingkat nasional terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.11 : Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah

No	Angka Partisipasi Sekolah	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	7 - 12 tahun	98,90%	94,86%	98,09%	96,88%	96,73%
2	13 - 15 tahun	92,17%	97,78%	98,78%	98,41%	94,22%
3	16 - 18 tahun	80,12%	84,24%	83,55%	88,49%	92,89%

Sumber : Dinas Pendidikan

➤ 3. Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi



Gambar III.12 : Pendidikan Inklusi

Persentase jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (JI) adalah proporsi jumlah sekolah di Kota Yogyakarta yang melayani pendidikan inklusi terhadap jumlah sekolah di Kota Yogyakarta. Jumlah sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2016 baik negeri maupun swasta masing-masing jenjang sebagai berikut : TK di kota ada 223, SD/MI sebanyak 168, SMP/MTs sebanyak 65,

SMA/MA sebanyak 48, dan SMK sebanyak 31, sehingga total sekolah sebanyak 535 sekolah.

Sekolah penyelenggara inklusi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang diawali dengan verifikasi SDM dan infrastruktur yang ada di sekolah. Berdasarkan data terakhir di Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di bulan Desember awal penyelenggara inklusi sebanyak 64 sekolah (tidak termasuk PAUD Inklusi)

Sebagai Kota yang memiliki komitmen tinggi pada layanan pendidikan inklusi, maka melalui RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2016 ini menargetkan jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi dengan target 9%.

Realisasi layanan pendidikan inklusi melebihi target yakni sebesar 11,96% atau naik hampir 1.51% dari tahun 2015.

Tabel III.12 : Daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusi

No	Sekolah	Status	Sejak Tahun
1	PAUD Among Putro	SWASTA	2010
2	PAUD Tiara Surya	SWASTA	2010
3	PAUD Among Siwi	SWASTA	2010
4	PAUD Ceria 21	SWASTA	2010
5	PAUD Bunga Indah 09	SWASTA	2010
6	TK ABA Nitikan	SWASTA	2010
7	TK Lab. Pedagogika	SWASTA	2014
8	TK Islam Pelangi Anak Negeri	SWASTA	2014
	Jumlah TK/PAUD	8	
9	1. SD Negeri Giwangan	NEGERI	2007
10	2. SD Negeri Karangayar	NEGERI	2008
11	3. SD Negeri Bangunrejo II	NEGERI	2008
12	4. SD Negeri Tamansari I	NEGERI	2008
13	5. SD Negeri Baciro	NEGERI	2009
14	6. SD Taman Muda IP	SWASTA	2009
15	7. SD Muhammadiyah Pakel	SWASTA	2009
16	8. SD Muhammadiyah Miliran	SWASTA	2010
17	9. SD Bopkri Bintaran	SWASTA	2010
18	10. SD Tumbuh	SWASTA	2009
19	11. SD Intischoole	SWASTA	2010
20	12. SD Muh. Danunegaran	SWASTA	2013
21	13. SD Muh. Purbayan	SWASTA	2013
22	14. SD Muh. Sapen 1	SWASTA	2002
23	15. SD Muh. Sagan	SWASTA	2013
24	16. SD Negeri Ungaran 1	NEGERI	2012
25	17. SD Negeri Pakel	NEGERI	2013
26	18. SD N Mendungan	NEGERI	2013
27	19. SD N Wirosaban	NEGERI	2013
28	20. SD N Bluyahrejo	NEGERI	2013
29	21. SD Minggiran	NEGERI	2013
30	22. SD Jetis 1	NEGERI	2014
31	23. SD Juara	SWASTA	2014
32	24. SD Balirejo	SWASTA	2014
33	25. SD Surokarsan	NEGERI	2016

No	Sekolah	Status	Sejak Tahun
34	26. SD Jetisharjo	NEGERI	2016
35	27. SDN Tegalpanggung	NEGERI	2014
36	28. SDN Panembahan	NEGERI	2014
37	29. SD Muh. Notoprajan	SWASTA	2015
	Jumlah SD		29
38	1. SMP Taman Dewasa IP	SWASTA	2010
39	2. SMP Muh. 7 Yogyakarta	SWASTA	2010
40	3. SMP N 2 Yogyakarta	NEGERI	2010
41	4. SMP Muhammadiyah 2 Yk	SWASTA	2002
42	5. SMP Muhammadiyah 9	SWASTA	2013
43	6. SMP N 15 Yogyakarta	NEGERI	2013
44	7. SMP N 1 Yogyakarta	NEGERI	2016
45	8. SMP Muh 10 Yogyakarta	SWASTA	2016
46	9. SMP N 13 Yogyakarta	NEGERI	2010
47	10. SMP N 5 Yogyakarta	NEGERI	2001
48	11. SMP N 4 Yogyakarta	NEGERI	2015
49	12. SMP Perintis	SWASTA	2015
50	13. SMP N 5 Yogyakarta	SWASTA	2008
	Jumlah SMP		13
51	1. SMA Muh. 4 Yogyakarta	SWASTA	2007
52	2. SMA Stella Duce 2	SWASTA	2008
53	3. SMA Muh. 7 Yogyakarta	SWASTA	2013
54	4. SMA Taman Madya IP	SWASTA	2011
55	5. SMA N 4 Yogyakarta	NEGERI	2010
56	6. SMA N 1 Yogyakarta	NEGERI	1997
57	7. SMA N 3 Yogyakarta	NEGERI	1997
58	8. SMA N 5 Yogyakarta	NEGERI	2012
59	9. SMA N 8 Yogyakarta	NEGERI	1997
60	10. SMA N 11 Yogyakarta	NEGERI	2014
61	11. SMA BOPKRI 1 YK	SWASTA	2014
62	12. SMA PEMBANGUNAN	SWASTA	2009
63	1. SMK N 5 YK	NEGERI	2015
64	2. SMK N 6 Yogyakarta	NEGERI	2016
65	3. SMK Muh. 2 Yogyakarta	SWASTA	2009
66	4. SMK Muh. 3 Yogyakarta	SWASTA	2009

No	Sekolah	Status	Sejak Tahun
67	5. SMK Muh. 4 Yogyakarta	SWASTA	2009
68	6. SMK Bopkri 2 Yogyakarta	SWASTA	2009
69	7. SMK Pembangunan	SWASTA	2009
	Jumlah SMA/SMK		19

Sumber : Dinas Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Jumlah sekolah dari TK – SMA/K cukup tersedia di Kota Yogyakarta.
- ✓ Kesadaran masyarakat akan pentingnya melek huruf sehingga banyak masyarakat yang belum mengenyam dunia pendidikan terfasilitasi adanya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar.
- ✓ Banyak stakeholder yang berkeinginan sekolahnya menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi;
- ✓ Tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan prasarana penunjang anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Hambatan :

- ✓ Keterbatasan jumlah dan kualitas pendidik serta sarpras untuk PKBM yang diselenggarakan masyarakat.
- ✓ Sosialisasi PKBM yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta kurang maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
- ✓ Kurangnya sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus (inklusi) yang harus ditangani.
- ✓ Kurangnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan prasarana penunjang anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Strategi Pemecahan masalah :

- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik serta sarpras untuk PKBM yang diselenggarakan masyarakat.
- ✓ Meningkatkan Sosialisasi PKBM yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga banyak masyarakat mengetahuinya.
- ✓ Sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus (inklusi) yang harus ditangani.
- ✓ Menambah ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan prasarana penunjang anak berkebutuhan khusus di sekolah.

Sasaran Strategis 7***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat***

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu **"Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto"** dan tujuan **"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan"**. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian dan Bappeda. Untuk mengukur sasaran ke tujuh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,50% dengan kategori predikat **sangat tinggi**. Adapun hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Tabel III.13 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pendapatan Perkapita (Rp)	15.612.924	16.627.646	17.433.492*	Rp 53,218 juta	Rp 53.739 juta	Rp 54.306 juta	100%
2	Jumlah koperasi aktif	464	466	456	469	481	469	97,51%
3.	Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	22.312	22.628	22.916	23.170	23.341	23.468	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja								99,50%

Uraian pencapaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

➤ 1. Pendapatan Perkapita

Tahun 2016 pendapatan perkapita kota Yogyakarta relatif telah memenuhi target yaitu sebesar Rp. 54.306 juta atau relatif meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta, peningkatan pendapatan perkapita ini ditunjang dengan adanya pariwisata yang semakin berkembang dengan peningkatan kunjungan wisata baik mancanegara dan domestik yang membawa dampak peningkatan pendapatan masyarakat seperti sektor hotel, perdagangan dan jasa.

Tabel III.14 : Pendapatan Perkapita Kota Yogyakarta 2015-2016

No	Indikator	Realisasi 2015	Realisasi 2016*
1.	Pendapatan Perkapita	53.218.857	53.818.957*

*Angka sementara BPS

Peningkatan Pendapatan Perkapita Kota Yogyakarta yang signifikan juga dikarenakan adanya pengukuran tahun dasar statistik (Nilai PDRB berdasar harga konstan 2010) dengan fariabel 17 sektor.

➤ 2. Jumlah Koperasi Aktif



Gambar III.13 : Pelathan koperasi

Jumlah Koperasi aktif memiliki capaian sebesar 97,51%. Keberadaannya hampir selalu memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Pemasyarakatan dan peningkatan peran koperasi dilakukan dengan terus melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan/ penyuluhan kepada masyarakat perihal peningkatan kelembagaan

bagi kelompok-kelompok pra koperasi dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki serta kepastian kelembagaan berupa Badan hukum. Kegiatan yang telah dilakukan untuk memajukan koperasi di Kota Yogyakarta antara lain : peningkatan kualitas sumber daya pengurus dan pengawas, peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pendampingan, pembinaan koperasi wanita, pembinaan terhadap koperasi konvensional, diklat pengurus koperasi, serta mengaktifkan kembali koperasi pasif. Terdapat hambatan seperti tidak

adanya dukungan dari pengurus bahkan anggota koperasi untuk membenahi organisasinya sehingga pembinaan dari dinas kurang berhasil. Hal inilah yang menyebabkan capaian jumlah koperasi aktif di tahun 2016 sebanyak 469 koperasi berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 481 koperasi hanya terealisasi sebesar 469 koperasi atau pencapaian indikator kinerja sebesar 97,51 %.

➤ 3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Gambar III.14 : Pelaku UMKM Batik Jumput Batikan Yogyakarta

Pelaku UMKM mengalami peningkatan dan melebihi jumlah yang ditargetkan dengan capaian 100,55%. Peningkatan ini terjadi karena pembinaan yang dilakukan dinas kepada masyarakat yang belum mempunyai kegiatan usaha berupa penumbuhan wirausaha baru agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Optimalisasi Griya UMKM dan pemanfaatan XT Square serta gerai Kriya di Pasar

Beringharjo sebagai sarana promosi usaha mikro kecil merupakan stimulan untuk pengembangan perekonomian yang lebih baik. Program yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang meliputi kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Promosi Penanaman Modal, Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM, Kajian Sumber Daya UMKM dan Penumbuhan wirausaha Baru.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Adanya Penyaluran dana bergulir bagi UMKM, terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN dan swasta, serta terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk;
- ✓ Beberapa Koperasi memperoleh penghargaan antara lain :
 - Koperasi Sari Husada memperoleh penghargaan Juara I Koperasi Berprestasi tingkat DIY untuk jenis pemasaran
 - Koperasi KPRI KGYB meraih juara III Fungsional

- ✓ Terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN, bank, akademisi dan swasta, terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk, serta tumbuhnya wirausaha muda melalui HBC baru;
- ✓ Peningkatan pendapatan perkapita.

Hambatan/Kendala :

- ✓ Tingkat pertumbuhan koperasi di Kota Yogyakarta sangat rendah. Tidak semua pra koperasi yang diberikan penyuluhan menindaklanjuti untuk pengajuan badan hukum
- ✓ Keterbatasan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif maupun UMKM;
- ✓ Kurangnya evaluasi keberhasilan / kegagalan program usaha mikro kecil.
- ✓ Keterbatasan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif maupun UMKM;
- ✓ Besaran dana bergulir bagi UMKM di rasa masih terlalu kecil.
- ✓ Adanya beberapa koperasi berbadan hukum provinsi

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Pemberian bantuan (pembinaan dan pelatihan) yang ditujukan kepada UMKM dievaluasi kembali agar tepat sasaran;
- ✓ Meningkatkan serta pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif dan UMKM.
- ✓ Hendaknya pemberian bansos yang ditujukan kepada UMKM dievaluasi kembali agar tepat sasaran;

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu **"Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto"** dan tujuan **"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan"**. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Kantor Kesatuan Bangsa. Untuk mengukur sasaran ke delapan tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata hasil capaian kinerja sasarnya sebesar 100,92% atau kategori predikat **Sangat tinggi**. Pengukuran kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat sebagai berikut:

Tabel III.15 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka kemiskinan	9,38%	8,82%	8,61%	8,61%	8,40%	8,75%	95,93 %
2	Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial	40%	40%	27,5%	25,75%	22,03%	21,01%	104,85%
Rata-rata Capaian Kinerja								100,92%

Uraian pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

➤ 1. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Di tahun 2016 angka capaian kemiskinan sebesar 8,75%.

Tabel III.16 : Perbandingan Persentase (%) Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Kota Yogyakarta			
Jumlah penduduk miskin	35.516	35.006	36.112*
Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	8,82	8,61	8,75*
Pemerintah DIY			
Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	541.900	532.590	550.230*
Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	15,03	14,55	14,9*

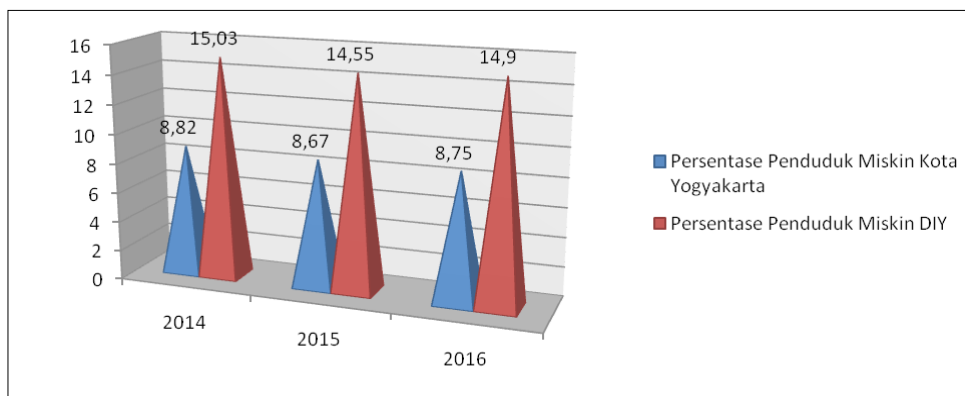
Ket *) Angka Sementara Hasil Pengolahan Sumber : BPS Kota Yogyakarta dan BAPPEDA Kota Yogyakarta

Hasil pengukuran BPS, yang diukur melalui instrumen survey kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta belum sesuai target, dimana dalam tahun 2015 angka kemiskinan Kota Yogyakarta berkisar 8,61% akan diturunkan menjadi sekitar 8,4% di tahun 2016. Kota Yogyakarta sangat komitmen dengan program pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dan menekan pengeluaran masyarakat miskin. Bentuk kegiatan antara lain jaminan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hingga sampai tingkat Kelurahan.

Tabel III.17 : Perbandingan Angka Kemiskinan Tingkat Nasional, Propinsi dan Kota

Tahun	Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
2012	11,66	15,83	9,54
2013	11,47	15,03	8,82
2014	10,96	14,55	8,61
2015	11,22	14,9	8,75
2016			

Catatan : N-1 (data dari BPS belum keluar)

Grafik III.3 : Angka Kemiskinan

➤ 2. Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

Di Kota Yogyakarta tingkat intensitas konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial sangat rendah dikarenakan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang intensif mengantisipasi berbagai macam perselisihan yang berindikasi SARA maupun kesenjangan sosial. Persentase intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial turun sebesar 4,74% atau mendekati 0 dari 25,75% menjadi 21,01%

Rendahnya prosentase konflik yang terjadi di Kota Yogyakarta dihitung dari jumlah penduduk yang dibina berbanding dengan jumlah penduduk yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam rumusan penghitungan ini dipergunakan asumsi organisasi kemasyarakatan yang terdata di Kantor Kesatuan Bangsa dimana dari 119 ormas yang memiliki SKT atau terdata resmi dan ada 25 ormas yang tidak aktif dalam menjalankan kegiatannya. Kantor Kesatuan Bangsa mengasumsikan bahwa 25 ormas itulah yang dilakukan pembinaan sehingga prosentase 21% itu diambil dari pembagian antara ormas tidak aktif yang diasumsikan sebagai penduduk yang dibina (25) dengan jumlah ormas yang terdata yang diasumsikan sebagai jumlah penduduk yang potensi menimbulkan konflik (119). Keaktifan ormas yang beranggotakan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menurunkan tingkat konflik yang terjadi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Tingkat kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat Yogyakarta sangat tinggi.
- ✓ Intensifnya pertemuan berbagai macam forum yang ada di masyarakat sebagai salah satu sarana penyelesaian di masyarakat.
- ✓ Terjalannya koordinasi yang baik dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA).

Hambatan/permasalahan :

- ✓ Kompleksitas penduduk di Kota Yogyakarta sangat heterogen sehingga memungkinkan timbulnya konflik sosial.
- ✓ Wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat aktivitas tingkat Propinsi rentan dengan adanya konflik sosial.

Strategi pemecahan :

- ✓ Melaksanakan kegiatan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara lain:
 - Melaksanakan kegiatan sarasehan cinta tanah air/wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, tokoh masyarakat, ormas/LSM, asrama/pondokan yang ada di Kota Yogyakarta.
 - Kegiatan deteksi dini oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA).
 - Meningkatkan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah dengan berkoordinasi dengan Forkompinda se-Kota Yogyakarta.

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat" dan tujuan "Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta". Pencapaian misi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur sasaran ke-9 (sembilan) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarnya sebesar 102,22% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai berikut:

Tabel III.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,2	80,51	80,51	83,78 *	80,1-83,0	8,75%	95,93 %
2	Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	86%	86%	82,3%	99,92%	99%	21,01%	104,85%
3.	Angka Pengangguran Terbuka	5,03%	6,57%	6,4%	6,35*	8,10%-5,75%	5,52%	105%
Rata-rata Capaian Kinerja								102,22%

(*) angka sementara

Uraian Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

➤ 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengukuran BPS (angka harapan hidup; angka melek huruf; rata-rata lama sekolah; rata-rata pengeluaran riil perkapita), capaian untuk Kota Yogyakarta sudah mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 84,56 dari yang ditargetkan sebesar 80,1 – 83,0, dimana indeks pembangunan manusia di Kota Yogyakarta terukur angka harapan hidup seiring dengan pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan dan kualitas lingkungan hidup, di sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf penduduk dewasa. Demikian juga Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan seiring yang ditandai

dengan adanya peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) dan Rata-rata pengeluaran riil perkapita.

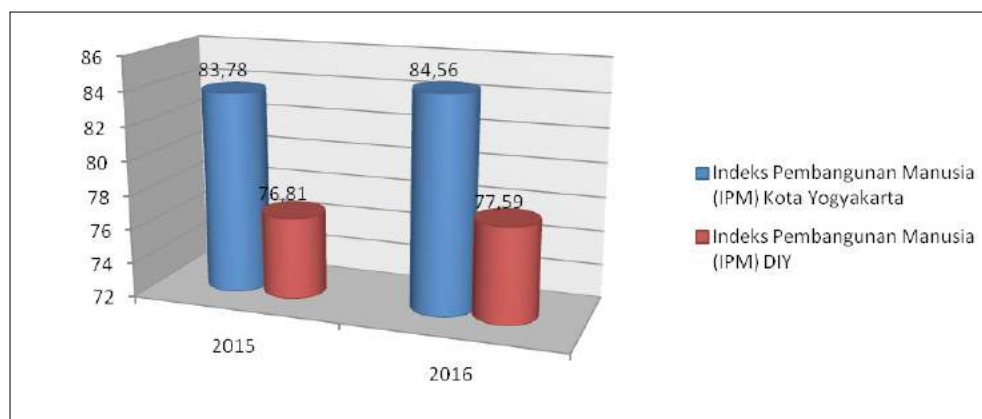
Tabel III.19 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Indikator	2015	2016*
1	Angka harapan hidup saat lahir (tahun)	74,05	74,25
2	Harapan Lama Sekolah	15,97	16,32
3	Rata-rata lama sekolah	11,39	11,41
4	Rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan (ribu rupiah)	16.755	17.317
	Indeks pembangunan manusia	83,78	84,56

Menurut Komponen di kota Yogyakarta tahun 2015-2016

(*) angka sementara BPS

Grafik III.4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Indek Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 84,56, angka ini paling tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten di DIY dan bahkan di tingkat DIY yang berada pada angka 77,59.

► 2. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

Berdasarkan POS Ujian Nasional bahwa kelulusan siswa ditentukan oleh Satuan Pendidikan. Jumlah peserta Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016 pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 27.329 siswa, sedang jumlah peserta UNPK dari Paket A,B, dan C sebanyak 633 warga belajar. Hasil kelulusan dari Satuan Pendidikan menyatakan bahwa jumlah peserta UN/UNPK sebesar 27.962 orang yang dinyatakan lulus sebesar 27.590 orang.

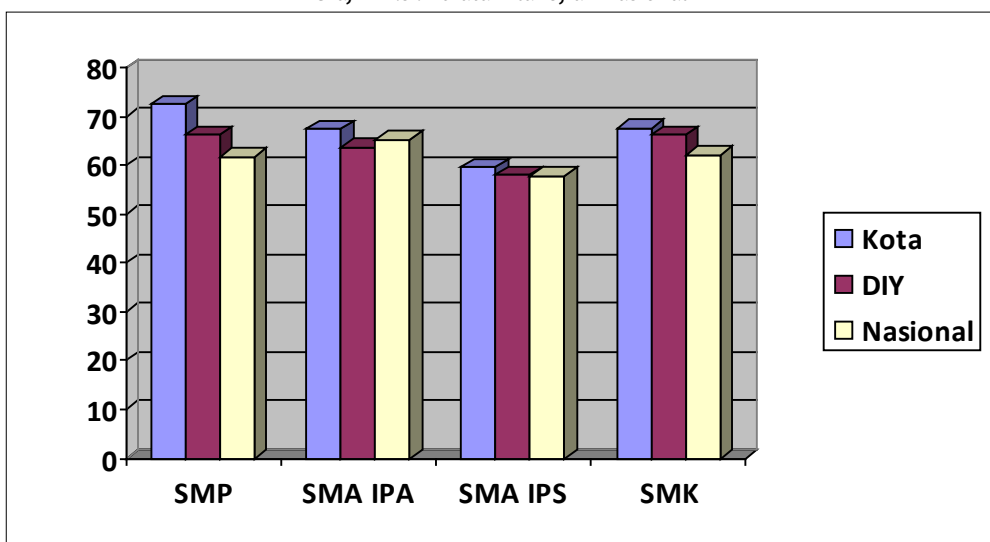
Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) pada tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 99% dan realisasi sebesar 98.67 % sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 99,67%.

Perbandingan rerata nilai ujian nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel III.20 : Rerata Nilai Ujian Nasional

TINGKAT	SMP	SMA IPA	SMA IPS	SMK
KOTA	72,5	67,4	59,6	67,6
DIY	66,2	63,6	58	66,2
NASIONAL	61,8	65,3	57,8	62,2

Grafik III.5 : Rerata Nilai Ujian Nasional



Tabel III.21 : Hasil Kelulusan UN/UNPK Tahun 2016

Indikator Kinerja	Capain Tahun 2015	Capaian Kinerja Tahun 2016			Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2015 terhadap 2016
		Target	Realisasi	(%)	(%)	(%)
Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	104.08%	99	98,67	99,67	99	99,66

► 3. Angka Pengangguran Terbuka

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki kewajiban dalam memperkecil angka pengangguran. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun langkah yang terarah dan berkesinambungan. Langkah tersebut meliputi pelatihan bagi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan professional. Penempatan kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja dan mengisi kesempatan kerja sektor formal yang tersedia. Sedangkan perluasan kesempatan kerja bertujuan membekali tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja untuk dapat membuka usaha mandiri. Angka pengangguran terbuka ditetapkan target 8,10-5,75%. untuk indikator ini pada tahun 2016. Target tersebut dapat terlampaui. Angka pengangguran sebesar 5,52%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 105%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Antusiasme dari tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan;
- ✓ Kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia;
- ✓ Penerapan Bursa Kerja Online yang memudahkan dan memperluas penyebaran informasi pasar kerja;
- ✓ Adanya pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyarakat;

Hambatan/masalah :

- ✓ Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehingga tidak semua angkatan kerja dapat diberikan pelatihan;
- ✓ Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil;
- ✓ Masih adanya ketidak sesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- ✓ Memperkuat koordinasi dengan perusahaan penyedia lowongan kerja untuk memastikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan;
- ✓ Meningkatkan penerapan Bursa Kerja Online;
- ✓ Mengadakan Job Fair
- ✓ Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Sasaran Strategis 10***Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Kuat***

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu **"Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat"** dan tujuan **"Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta"**. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian dan Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama. Untuk mengukur sasaran ke sepuluh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 131,46% dengan kategori predikat Sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya perekonomian daerah yang kuat adalah sebagai berikut:

Tabel III.22 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,76%	5,64%	5,30% *	5.30%	5,2%-5.5%	5,16%	95,93 %
2	Inflasi	4,31%	7,32%	6,59%	3,09%	6-7,5%	4,06%	132,33%
3.	Pendapatan Pajak dan retribusi daerah (Rp)	246.474.074.007	270.960.657.373	317.421.685.547	345.980.907.989	225-231 Milyar	367.170.979.336	162,84%
Rata-rata Capaian Kinerja								131,46%

➤ 1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan pertambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tercapai sebesar 5,16% yang ditandai

dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling besar kontribusinya ditunjang oleh Sektor Industri Pengolahan (25,43%), Sektor Jasa Akomodasi dan Makan Minum (20,17%), Informasi dan Komunikasi (20,81%).

Tabel III.23 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015

No	Indikator	Realisasi		Tahun 2016*		
		2014	2015	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,47%	5,30% *	5,2% - 5,5%	5,16%*	99,23%

(*) Angka sementara hasil pengolahan.BPS

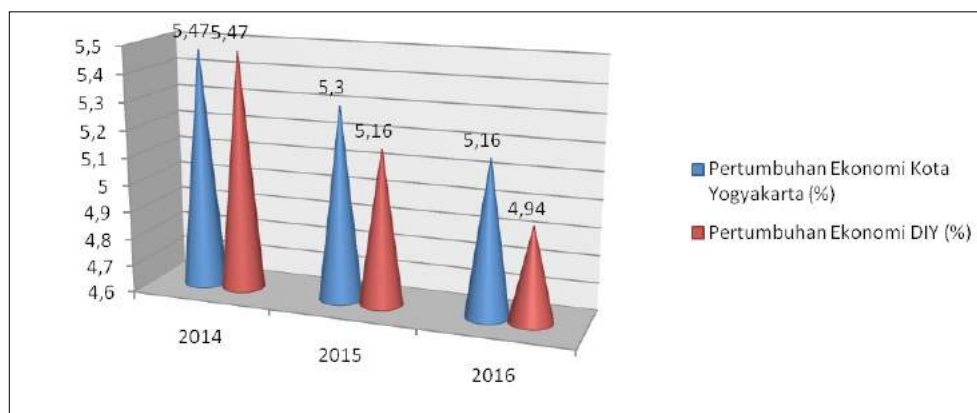
Tabel III.23 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2015

No	Indikator	Realisasi		Tahun 2015		
		2013	2014	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,64%	5,30% *	4,99% - 5,5%	5,30% *	100%

(*) Angka sementara hasil pengolahan.BPS

Penurunan terjadi pada sektor pertanian. Adapun untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, Jasa Akomodasi dan Makan Minum, dan Informasi dan Komunikasi mengalami kenaikan.

Grafik III.6 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta



➤ 2. Inflasi

Inflasi pada tahun 2016 berada di bawah target yang ditetapkan, hal ini berarti telah tercapai pengendalian yang kuat dari pemerintah melalui TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah) serta terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan yang didukung dengan kuatnya koordinasi antara Dinas Perindagkoptan dengan pihak-pihak yang terkait ketahanan ekonomi. Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 4,06%.

Tabel III.25 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2015

Tahun	2014	2015
Inflasi Kota Yogyakarta	6.59	3.09
Inflasi Provinsi Jawa Tengah	8.22	2.73
Inflasi Nasional	8.36	3.35

* angka sementara hasil pengolahan BPS

➤ 3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pengukuran kinerja dalam formulir pengukuran kinerja dari Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar 225-231 Milyar dalam Rencana Strategis, pada tahun 2016 ditetapkan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah APBD 2016 sebesar Rp.365,488,041,078.

Prosentase capaian dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Rencana strategis RPJMD dengan realisasi sasaran tahun 2016 dihitung sebagai berikut:

$$\frac{376,170,979,336}{231,000,000,000} \times 100\% = 162.84\%$$

Hasil evaluasi kinerja terlihat dalam prosentase capaian target dalam RPJMD dan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 162.84% dengan predikat sangat berhasil. Dapat dilihat bahwa terdapat gap lebih dari 10% yaitu adanya kelebihan capaian sebesar 62,84%. Adanya gap yang cukup besar dari perencanaan RPJMD menunjukkan terdapat kondisi dinamis selama masa awal perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak bisa atau belum diperhitungkan dalam perencanaan.

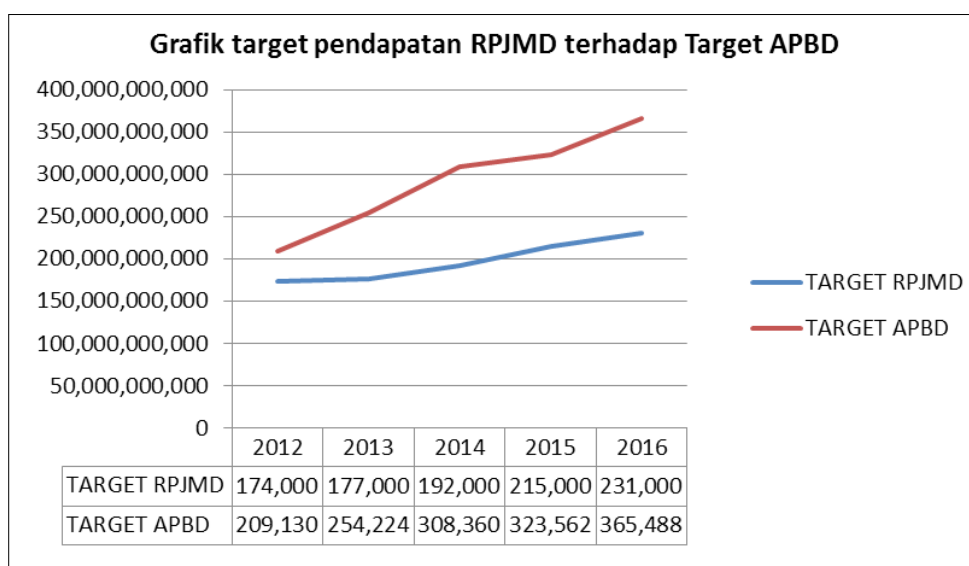
Dapat kita lihat tren kenaikan PAD khususnya pajak dan retribusi di kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.26 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap APBD 2012-2016

TH	REALISASI (Rp.)	TARGET APBD (Rp.)	CAPAIAN %
2012	246,474,074,007	209,130,023,743	118.00%
2013	270,960,657,373	254,224,852,524	106.58%
2014	318,758,543,616	308,360,782,370	103.37%
2015	345,980,907,989	323.582,357.910	106.92%
2016	376,170,979,336	365,488,041,078	102.92%

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2016 (*Unaudit)

Grafik III.7 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta terhadap target APB 2012-2016



Dengan melihat data realisasi dan target Pajak dan Retribusi Daerah terlihat adanya trend yang naik setiap tahun. Dari grafik juga terlihat trend kenaikan dengan garis hampir sejajar antara realisasi dan target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari data prosentase capaian dan gambar target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terlihat adanya gap yang semakin membesar mulai tahun 2012. Adanya gap yang semakin membesar antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah ini menunjukkan belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan. Pada tahun 2014 penetapan target Pajak dan Retribusi semakin optimal ditunjukkan oleh gap yang semakin mengecil. Kemudian di tahun 2015 dan 2016 kembali muncul gap yang semakin besar, hal tersebut menunjukkan masih diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah.

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi antara lain:

- ✓ Masih kurang lengkapnya data potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki.
- ✓ Belum semua SKPD pemungut mampu memberikan data potensi yang up to data sehingga data potensi pajak dan retribusi daerah masih ada kekurangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

- ✓ Angka Inflasi yang menurun tidak terlepas dari kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah yang telah mengambil kebijakan di sisi kelembagaan, kebijakan retribusi pasar, dan kebijakan jaminan sosial yaitu dengan adanya jaminan pendidikan daerah dan jaminan kesehatan daerah;
- ✓ Keberadaan Gerai Investasi sebagai unit pelayanan non struktural yang bertugas memberikan informasi potensi/pelebaran investasi bagi calon investor diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Potensi investasi tersebut di peroleh melalui studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) yang dilakukan di 14 Kecamatan yang selesai di Tahun 2012. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan penyusunan kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang telah menetapkan 3 (tiga) sektor unggulan di Kota Yogyakarta yaitu : 1). Sektor Pariwisata, 2). Sektor Angkutan dan Komunikasi, dan 3). Sektor Jasa-jasa. Hasil tersebut mendasarkan pada kajian dari Bank Indonesia dan UGM. Pada tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan penyusunan informasi peluang Usaha Sektor Prioritas di Kota Yogyakarta yaitu pada sektor pariwisata dan sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan di Tahun 2016 ini telah dilaksanakan penyusunan informasi peluang usaha sektor Jasa di Kota Yogyakarta. Perbaikan iklim investasi diharapkan akan meningkatkan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi usaha. Dengan dukungan kegiatan evaluasi dan monitoring pencapaian PAD akan semakin optimal.

Hambatan/masalah :

- ✓ Belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah karena keterbatasan data potensi yang dimiliki, serta belum up to date nya database potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki;
- ✓ Belum berjalannya upaya optimalisasi BUMD karena keterbatasan kewenangan;
- ✓ Sulitnya mendapatkan data pendukung penanaman modal yang akurat dan valid karena belum adanya lembaga yang secara khusus menangani penanaman modal dan belum adanya output kegiatan yang secara khusus mendukung hal tersebut yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pengampu Penanaman Modal tersebut;
- ✓ Belum optimalnya komunikasi mitra kerja dengan SKPD terkait;
- ✓ Masih lambatnya pemecahan permasalahan kerjasama terutama dalam pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah
- ✓ Menyusun kajian terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Strategi penyelesaian masalah/hambatan :

- ✓ Untuk mengatasi permasalahan maupun kendala yang ada dilakukan langkah antisipatif yang akan diambil sebagai berikut:
 - Menerbitkan surat edaran dan secara aktif melakukan permintaan data kepada seluruh SKPD pemungut untuk memberikan data potensi yang dimiliki;
 - Melakukan studi potensi untuk melangkapi data potensi yang dimiliki sebagai bahan acuan penentuan target pendapatan;
 - Melakukan penjajagan kepada instansi terkait mengenai kemungkinan pembuatan sistem informasi pendapatan dan potensi daerah yang terintegrasi;
 - Menerbitkan surat edaran dan secara aktif melakukan permintaan data kepada seluruh SKPD pemungut untuk menyusun data realisasi pendapatan secara tepat waktu;

- Optimalisasi kegiatan gerai investasi untuk pengumpulan data penanaman modal dari investor dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pembentukan lembaga yang khusus menangani penanaman modal;
- Melakukan pembinaan kepada SKPD sehingga dapat lebih proaktif dalam mengoptimalkan jaringan kerjasama yang ada;
- Memberi masukan berupa kajian dan telaah yang lebih komprehensif sebagai bahan bagi pengambil keputusan dalam memutuskan permasalahan kerjasama.
- Melakukan study potensi pajak dan retribusi secara berkala;
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendapatan kepada SKPD pemungut;
- Mendorong instansi untuk menggunakan sistem informasi pendapatan;
- Mengoptimalkan kegiatan Gerai Investasi sebagai unit pelayanan nonstruktural dalam penyediaan informasi data potensi investasi kepada calon investor yang datang;
- Menyusun kajian terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Sasaran Strategis 11

Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu "**Mewujudkan Daya Dukung Pengembangan Usaha**" dan tujuan "**Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta**". Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,77% dengan kategori predikat **Sangat tinggi**. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha terlihat sebagai berikut:

Tabel III.27 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016/Akhir RPJMD		
						Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	100%	118,43%	95,29	100%	98.88%	98.88%
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan (K3)	90%	97.09%	98,95%	99,02	94%	98,55%	104,84%
3	Persentase luasan RTH Kota	33,2%	33,68%	33,74%	33,77%	35,30%	33,77%	95,68%
4	Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	64,71%	62%	51,06%	78,26%	100%	79,73%	79,73%
5	Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	64,71%	62%	68,09%	78,26%	100%	79,73%	79,73%
Rata-rata Capaian Kinerja								91.77%

Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

➤ 1. Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur



Gambar III.15 : Perizinan Online

memenuhi syarat sebesar 9135 atau 98.88%

Untuk pencapaian indikator penerbitan izin pada tahun 2016 di perhitungkan dari izin yang di terbitkan di bagi jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat. Jumlah izin yang diterbitkan s/d desember 2016 sebesar 9033, jumlah pemohon sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar 10.145 dikurangi jumlah ijin yang ditolak karena tidak memenuhi syarat 1010, sehingga jumlah pemohon yang

Jenis perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan berjumlah 31

jenis perizinan dan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga ada beberapa jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, Izin Juru Bor Air Bawah Tanah), Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengganti Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. maka jumlah izin yang ditangani Dinas Perizinan menjadi 27 izin. Tahun 2016 target dari izin yang diterbitkan sebanyak 7.618 izin dengan realisasi sebesar 9033 izin atau 118.57 % melebihi target.

➤ 2. Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)



Gambar III.16 : Razia Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan

Pada tahun 2016, capaian penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 104,84 % didapat dari rasio realisasi penegakan perda K3 yang terselesaikan (98,55 %) dan target penyelesaian K3 (94 %). Realisasi 98,55 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 6038 pelanggar dari 6127 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{6038}{6127} \times 100\% = \mathbf{98,55\%}$$

Jumlah 6038 pelanggar didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4591 pelanggar dan secara yustisi sebesar 1447 pelanggar, kemudian untuk jumlah 6127 pelanggar didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 4591 pelanggar dan dari hasil operasi yustisi sebesar 1536 pelanggar. Pada tahun 2015 capaian penegakan perda mencapai sebesar 106,47 % dengan realisasi sebesar 99,02 %. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2015 lebih tinggi daripada capaian

kinerja pada tahun 2016 ini. Meskipun demikian capaian kinerja penegakan perda tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan.

➤ 3. Persentase luasan RTH kota.

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri atas taman kota, taman pergola, pohon perindang jalur hijau, ruang terbuka hijau permukiman/wilayah, dan ruang terbuka hijau publik (RTHP) yang terbangun. Capaian kinerja sasaran tahun 2016 sekaligus capaian kinerja untuk akhir periode renstra 2012-2016 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu sebesar 33,77 yang berarti belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 35,30%.



Gambar III.17 : RTHP Kel Gunungketur

Sampai dengan tahun 2016 luas RTH Kota Yogyakarta seluas 10.974.798 m² atau 33,77 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Capaian Kinerja diatas merupakan hasil kerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota dan Peningkatan Taman kota yang menghasilkan Output pembangunan Taman Kota di Jl Soga (300 m²) Jl. soka (640 m²) Jl KHA Dahlan (520 m²), Jl Kapas (1.850 m²) dan Jl Kartini (896 m²). Selain itu Pemeliharaan rutin juga dilakukan di sejumlah ruas jalan yang ada di Yogyakarta.

➤ 4. Persentase Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran air



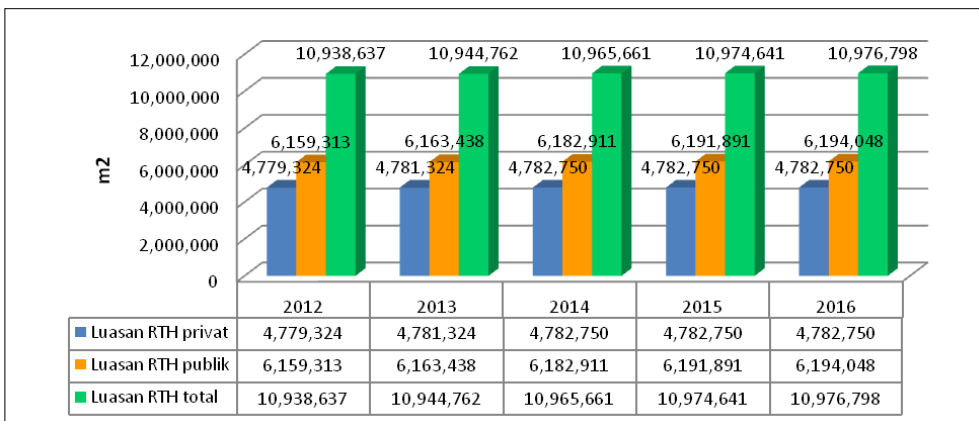
Gambar III.18 : Pengambilan Sampel Air

Indikator kinerja ini diukur melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap perusahaan. Ketaatan pengelolaan oleh perusahaan ditandai dengan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran air baik secara administratif maupun teknis. Capaian kinerja sasaran tahun 2016 sekaligus capaian kinerja untuk akhir periode

2012-2016 menunjukkan capaian kinerja yang cukup tinggi sebesar 79,73% Dari hasil

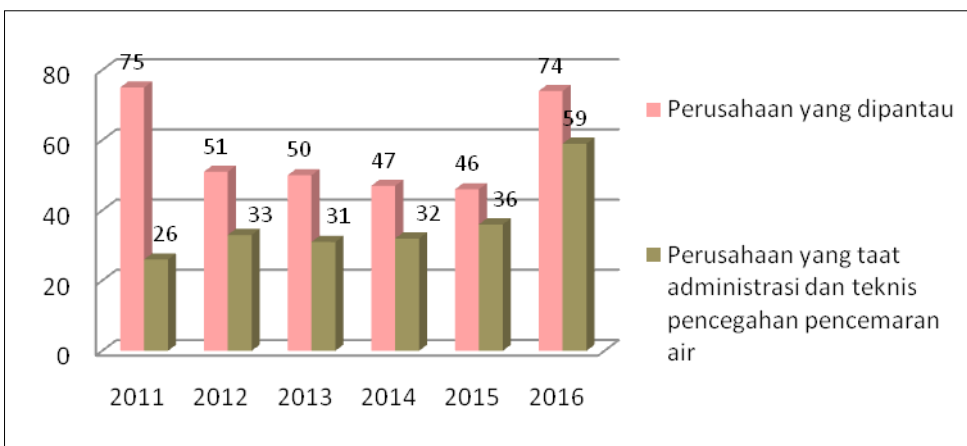
pemantauan rutin tercatat dari sebanyak 74 perusahaan yang dipantau sebanyak 59 perusahaan (79,73%) dianggap telah menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

Grafik III.8 : Luasan RTH Kota Yogyakarta



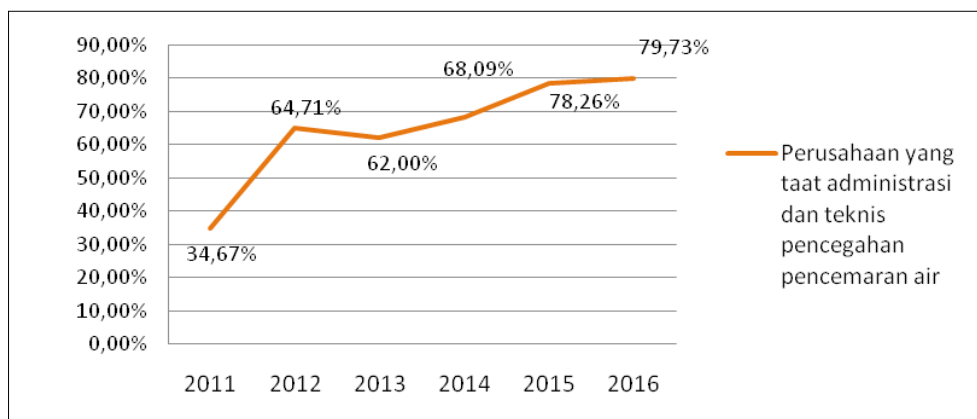
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Grafik III.9 : Pemantauan perusahaan yang menaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Grafik III.10 : Pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

► 5. Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak



Gambar III.19 : Pemantauan Uji Udara Ambien Permukiman

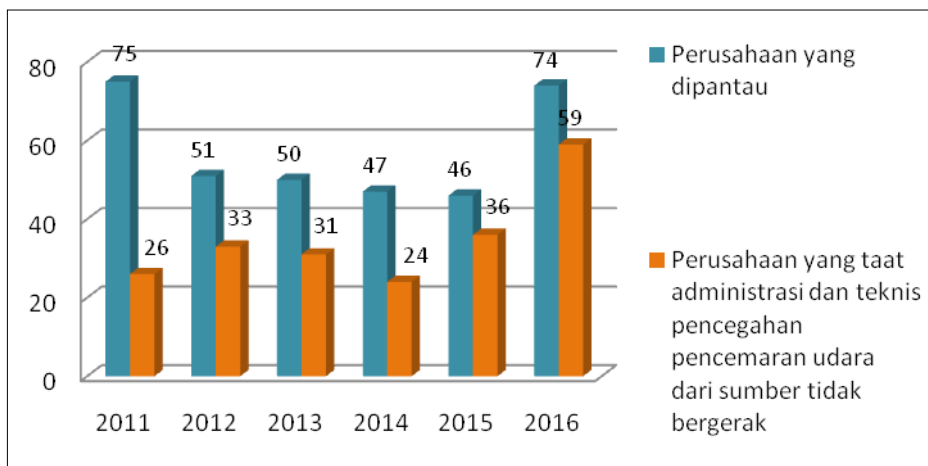
Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap perusahaan. Ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan ditandai dengan ketaatan perusahaan tersebut dalam melakukan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak secara administratif maupun secara teknis.

Capaian kinerja sasaran tahun 2016 sekaligus capaian kinerja untuk akhir periode 2012-2016 menunjukkan capaian kinerja yang cukup tinggi sebesar 79,73%

Dari hasil pemantauan rutin terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan, dari sebanyak 74 persen perusahaan yang dipantau, hanya 59 perusahaan (79,73%) yang tercatat telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

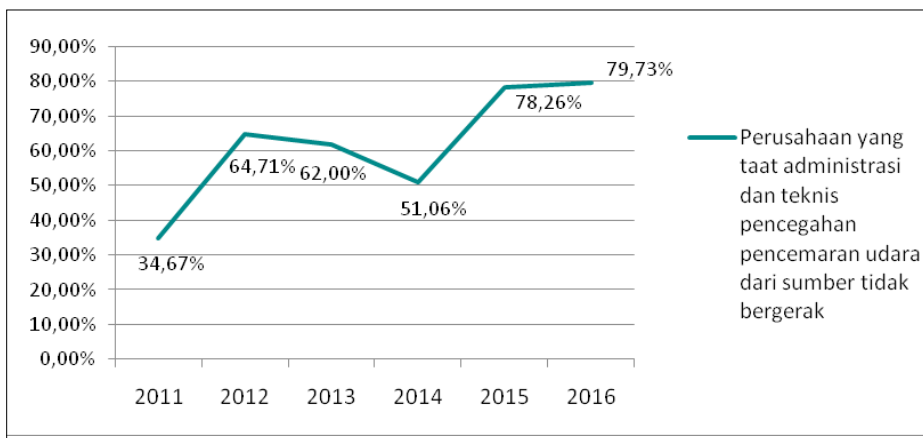
Peningkatan jumlah ini menunjukkan bahwa saat ini perusahaan mulai tertib di dalam melakukan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan melakukan uji emisi pada sumber emisi tidak bergerak di perusahaan mereka, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Grafik III.11 : Pemantauan perusahaan yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Grafik III.12 : Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

Dalam hal mewujudkan Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan (K3) yang kondusif:

- ✓ Fungsi dan ketugasan Penyidik PNS (PPNS) berada dalam satu koordinasi Dinas Ketertiban sehingga pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah secara yustisi lebih efektif dan responsif;

- ✓ Penempatan petugas Polisi Pamong Praja di tiap kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) Kecamatan memudahkan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan daerah yang responsif di wilayah;
- ✓ Metode penegakan Peraturan Daerah secara pre-emptif dan preventif dengan optimalisasi kegiatan tematik penumbuhan “Gerakan Kampung Panca Tertib”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- ✓ Intensifikasi pelaksanaan koordinasi internal di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta dari tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi, maupun koordinasi eksternal dengan melibatkan institusi penegak hukum yang lain dan unsur masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- ✓ Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi;
- ✓ Menyederhanakan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan
- ✓ Memberi pelayanan perizinan secara paralel;
- ✓ Membentuk petugas penghubung;
- ✓ Memberi pelayanan konsultasi/ klinik pelayanan perizinan (KLIPPER);
- ✓ Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik;
- ✓ Membangun aplikasi routing slip secara teknologi informasi (TI) maupun manual;
- ✓ Untuk mewujudkan transparansi pelayanan perizinan tersedia fasilitas SMS Gate Way;
- ✓ Membuat aplikasi pelayanan secara online;
- ✓ Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha;
- ✓ Menerapkan management mutu ISO 9001:2008, sejak tahun 2010 sampaisekarang.

- ✓ Meskipun Luasan RTH belum memenuhi target tahun 2016 namun luasan RTH mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hambatan/masalah :

- ✓ Masih adanya pelanggaran peraturan daerah yang tidak memenuhi panggilan penyidikan;
- ✓ Sanksi yang diberikan pengadilan kepada pelanggaran peraturan daerah dirasa kurang menimbulkan efek jera sehingga masih terdapat masyarakat yang berulang kali melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- ✓ Kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan daerah menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya pelanggaran perda
- ✓ Tahapan penegakan peraturan daerah masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (Simgakda), khususnya dalam hal pendataan pelanggaran, yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif.
- ✓ Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan izin dianggap sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya kejelasan, kurang transparansi persyaratannya, proses penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik;
- ✓ Upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH;
- ✓ Luasan RTH privat secara umum telah memenuhi persyaratan minimal 10% dari luas wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan RTH Publik masih belum memenuhi persyaratan minimal 20% dari luas wilayah meskipun secara keseluruhan RTH Kota telah memenuhi batas minimal 30% dari luas wilayah Kota Yogyakarta
- ✓ Masih ada anggapan dari para pelaku usaha bahwa untuk melakukan pengolahan limbah cair dengan instalasi (IPLC) membutuhkan biaya mahal
- ✓ Perusahaan dianggap belum mentaati persyaratan teknis dan administrasi pencegahan pencemaran air apabila diketahui perusahaan belum melaksanakan uji laboratorium limbah cair dari buangan secara minimal sebulan sekali

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Mengoptimalkan penumbuhan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui sosialisasi kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib dan Gerakan Jogja Tertib Rokok.
- ✓ Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas masyarakat yang peduli dengan Kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- ✓ Mengoptimalkan kegiatan penyidikan dengan melaksanakan penjemputan paksa pelanggar yang tidak memenuhi panggilan penyidikan;
- ✓ Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah secara yustisi melalui penyidikan dengan pemeriksaan singkat atau biasa;
- ✓ Penindakan hukum terpadu dengan melibatkan SKPD terkait dan aparaturnya penegak hukum yang lain;
- ✓ Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi dan ketugasan di bidang hukum serta pihak terkait lainnya untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan produk hukum daerah
- ✓ Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota;
- ✓ Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau;
- ✓ Meningkatkan kualitas tamankota dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukung taman
- ✓ Membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
- ✓ Meningkatkan edukasi dan fasilitasi pembangunan IPLC komunal bagi masyarakat khususnya dunia usaha yang menjadi kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku

- ✓ Melakukan pembinaan dan pemantauan secara intensif terhadap perusahaan agar melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga potensi dampak/masalah lingkungan dapat dikendalikan.
- ✓ Melakukan tindakan yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan sumber daya yang ada diprioritaskan untuk pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, namun demikian tetap memperhatikan efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7	18
I	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B	Dalam proses penyusunan LKIP di Bag. Organisasi	0	2.012.619.810	1.553.719.289,28	77,20
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi	sangat tinggi	100%			
		Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eskternal	Wajar (WTP)	0	0	10.039.322.003	7.262.238.231	72,34
II	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	74	74	100	1.623.502.164	1.503.403.766	92,60
		Angka Kematian Ibu Perseratus Ribu Kelahiran Hidup	< 102	114,91	37,33			
		Angka kematian bayi Per Seribu Kelahiran Hidup	6,7	8,62	184,54			
		Prevalensi kekurangan gizi (gisi kurang dan gizi buruk)	8,00%	7,97	99,68			
III	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Rumah sakit	74	77,52	104,8	700.000.000	642.840.800	91,83
		Indeks kepuasan layanan kesehatan	80	78,67	98,34	731.194.130	688.643.943	94,18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7	18
IV	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	69,41	63,41	9.441.337.045	5.707.964.994	60,46
		Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota	18,00%	22,19	0,77	15.265.481.120	4.669.080.343	30,59
		Persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir	80%	77,98	1,88	9.487.471.956	9.066.491.599	95,56
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	100	100	5.902.116.000	4.177.175.000	70,77
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100	100	5.367.110.775	4.389.784.126	81,79
V	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9	79,11	434	3.086.700.850	2.743.093.899	88,87
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lawan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	94%	96,77	2,21	3.004.977.918	2.716.539.226	90,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7	18
VI	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97%	94,92	3,24	100.835.305.150	95.953.125.577	95,16
		persentase Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9,4%	11,96	0,31	21.293.333.750	18.946.496.794	88,98
		Angka melek huruf	98,3%	99,92	1,27	3.298.338.848	3.061.811.107	92,83
VII	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp.)	Rp.53.739 jt	Rp.54.306 Jt	101,05	990.362.000	951.438.675	96,07
		Jumlah koperasi aktif	481	469	97,51	785.021.900	744.224.926	94,80
		Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	23.341 UMK	23.468 UMKM	101	2.043.053.610	1.993.196.304	97,56
VIII	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Angka kemiskinan	8,4%	8,67	97	1.032.539.220	885.901.035	85,80
		Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	22,03% per Thn	21,01	29965,43	516.840.000	468.639.482	90,67
IX	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Indek pembangunan manusia	80,1 - 83,0	84,56	102%	990.362.000	951.438.675	96,07
		Tingkat kelulusan ujian nasional (Un / Unpk)	99%	98,67%	99,67	7.986.801.662	7.076.474.737	88,60
		Angka pengangguran terbuka	8.10-5.75%	5,52%	105	1.447.760.450	969.768.277	66,98
X	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan ekonomi	5,2% -5,5%	5,46	100%	990.362.000	951.438.675	96,07
		Inflasi	6 - 7,5 %	4,06%	132,33	2.559.619.140	2.325.167.620	90,84
		Target Pendapatan pajak dan retribusi daerah	225 -231 milyar	339,199,144,799	146,84%	990.362.000	951.438.675	96,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7	18
XI	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha berwawasan lingkungan	Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	102,17	102,17%	2.791.853.575	2.672.718.060	95,73
		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Kota Yogyakarta.	94%	98,55	104,84%	8.838.680.000	7.594.510.422	85,92
		Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	35,3%	33,77%	95,68%	7.985.296.045	7.382.126.562	92,45
		Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (Per.MENLH No.19/2008 ttg SPM Bid LH dalam Prop.dan Kab/Kota).	100%	79,73%	122,00%	2.454.532.600	2.179.958.074	88,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	3	4	5	6	7	18
		Persentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (Per MENLH No.19/2008 ttg SPM Bid.LH dalam Prop. dan Kab / Kota).	100%	79,73	1,47			

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2016 telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2015



Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai "BB" (Sangat Baik) dan memperoleh nilai 70,11. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Yuddy Chrisnandy, diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dra.Titik Sulastri mewakili Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bertempat di Jogja Expo Center.

Diterimakan Senin, 25 Januari 2016

2. Penghargaan SINDO WEEKLY GOVERNMENT Award 2016



Kota Yogya mendapat penghargaan Sindo Weekly Government Award 2016, sebagai Kota Terbaik dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang digelar pada Selasa Malam di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil kepada Walikota Yogyakarta, H.Haryadi Suyuti.

Diterimakan Selasa, 12 April 2016

3. Penghargaan Pembina BUMD Terbaik 2016



Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Yogya yakni Bank Jogja dan PDAM TirtaMarta berhasil meraih penghargaan BUMD Award 2016.

Bank Jogja mendapat penghargaan kategori TOP BPR terbaik 2016, sedangkan PDAM Tirtamarta mendapat penghargaan kategori TOP BUMD terbaik 2016. Prestasi kedua BUMD tersebut tak lepas dari peran Walikota Yogyakarta sebagai pembina. Maka

pada kesempatan tersebut Majalah BusinessNews juga menganugerahkan dua penghargaan sekaligus kepada Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yakni sebagai TOP Pembina BPR terbaik 2016 dan TOP Pembina PDAM terbaik 2016.

Penyerahan penghargaan ajang kompetisi yang dihelat setiap dua tahunan dan diikuti oleh hampir seluruh BUMD multiusaha se-Indonesia ini di gelar di D-Hall JIEXPO Kemayoran Jakarta

Diterimakan Kamis, 5 Mei 2016

4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015. Ini berarti Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat WTP selama (7) tujuh tahun berturut-turut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian diperoleh pada acara Penyerahan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2015 kepada Walikota dan Bupati se-DIY bertempat di Gedung BPK Perwakilan Yogyakarta.

Diterimakan Senin, 30 Mei 2016

5. Penghargaan Arsip Award 2016



Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Teladan terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Asman Abnu dan diterima oleh Kepala Arpusda Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko bertempat di RedTop Hotel,

Jakarta.

Penghargaan diperoleh atas kesungguhan Arsip Kota Yogya yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip vital berupa vaulting, selain juga depo arsip dinamis dan statis yang telah memenuhi standar kearsipan.

Diterimakan Rabu, 17 Agustus 2016

6. Penghargaan Attractiveness Award 2016



Kota Yogyakarta kembali meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Indonesia Attractiveness Award 2016 sebagai Kota Terbaik dan Kota Terbaik Kategori Pariwisata dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Asman Abnur kepada Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta,

MK Pontjosiwi, Kamis (22/9) di Hotel Mulia Jakarta.

Penghargaan diberikan berdasarkan pada pengukuran dan observasi yang dilakukan oleh Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group yang memberikan gambaran tentang daya tarik setiap Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Diterimakan Kamis, 22 September 2016

7. Penghargaan Kawastara Pawitra



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta karena memiliki kinerja yang memuaskan dalam program pelatihan kepala sekolah, serta implementasi Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah atau Madrasah Secara Berkelanjutan. Kawastara Pawitra merupakan penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) kepada Pemerintah Daerah yang dianggap peduli terhadap program pelatihan kepala sekolah.

Penghargaan diserahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Yogyakarta Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd mewakili Walikota Yogyakarta di Hotel Novotel Surakarta, Sabtu (15/10).

Diterimakan Sabtu, 15 Oktober 2016

8. Penghargaan ICSB Indonesia City Award 2016



Kota Yogyakarta meraih penghargaan di tingkat nasional dari International Council For Small Business (ICSB) award 2016 kategori Natamukti Pranata, sebagai Kota Terbaik dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Natamukti Pranata adalah penghargaan untuk daerah (Kota/Kabupaten) yang sukses mengelola dan menciptakan ekosistem yang baik untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerahnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh President of ICSB Indonesia Hermawan Kertajaya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yogyakarta, Sulistiyo bertempat di Ballroom, Harris Hotel & Residence, Bali.

Diterimakan Selasa, 29 November 2016

9. Penghargaan Smart City Kategori Kota Menengah



Lembaga independen non pemerintah CitiasiaInc memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas keseriusannya dalam mewujudkan Smart City atau Kota Pintar. Kota Yogyakarta berhasil meraih nilai tertinggi dalam indexmaturity kesiapan daerah menuju Smart City untuk kategori Kota Menengah. Penghargaan

diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara diterima oleh Kepala Bappeda Pemerintah Kota Yogya Edy Muhammad, di Jakarta

Diterimakan Selasa, 29 November 2016

10. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Dari Ombudsman RI



Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat Rapor Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia dan mendapat penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi, terhadap standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hasil didasarkan pada penilaian yang dilakukan ORI terhadap 42 produk layanan administrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta Daerah Kota Yogyakarta, pada bulan Mei-Agustus 2016 lalu. Pemerintah

Kota Yogyakarta termasuk kategorisasi Pemerintah Daerah Kota mendapatkan nilai rata – rata 85,46. Dengan demikian Pemkot Yogyakarta termasuk dalam zona kepatuhan hijau. Artinya tingkat kepatuhan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta Tinggi. Tingkat kepatuhan Tinggi apabila dinilai dengan angka, mendapat nilai 80-100.

Selama bulan Mei-Agustus 2016, Ombudsman melakukan observasi dan memberikan penilaian terhadap 42 produk layanan di 9 Unit Layanan (SKPD) yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 produk layanan, Dinas Kesehatan (5), Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (3), Dinas Pendidikan (4), Dinas Perhubungan (5), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (5), Dinas Perijinan (5), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5) serta Kantor Arsip dan Perpustakaan (5).

Diterimakan Rabu, 7 Desember 2016

11. PENGHARGAAN (Anugerah Parahita Ekapraya) APE 2016 KATEGORI UTAMA

Pembangunan Kota Yogyakarta yang terintegrasi dan berkomitmen terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sertifikat Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Yohana Yembise kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tahun 2016 ini berhasil naik ke tingkat Utama. Penghargaan memang bukan tujuan akhir, tetapi sebagai penanda bahwa Pemerintah Kota sudah on the track dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Tentu saja bersama dengan segenap SKPD, masyarakat dan dunia usaha, kita akan terus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan.

Diterimakan Jumat, 23 Desember 2016



BAB IV

Penutup





Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016, menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2016 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2012-2016 dan telah memenuhi 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 35 indikator kinerja sasaran. Satu Indikator yang belum dapat dihitung karena indikator tersebut masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu pada indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisasi karena masih dalam proses audit BPK yang hasilnya diperkirakan akan diketahui pada akhir bulan Juni. Sehingga ada 34 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu Dari 35 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya, ada 27 indikator sasaran atau 82,50% telah mencapai kategori sangat tinggi, 5 indikator sasaran strategis atau 14,70% telah mencapai kategori tinggi, 1 indikator sasaran strategis atau 2,94% telah mencapai kategori sedang.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.738.602.096.472 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 1.615.426.581.637,- atau 92,92%. (data per tgl 8 Februari 2017).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2012-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016. Terhadap target capaian yang belum tercapai, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengambil langkah yang konstruktif dan konkrit seperti sasaran program yang belum tercapai seratus persen maupun capaian dari pembangunan jangka menengah, akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di masa-masa mendatang.

Yogyakarta,

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si

NIP. 19580819 198403 1 005

Lampiran

LAMPIRAN : I



REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si

Jabatan : Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta,

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si

NIP. 19580819 198403 1 005

LAMPIRAN : I**REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B
		Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal	Wajar (WTP)
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi
II	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74
		Angka Kematian Ibu Per seratus ribu Kelahiran Hidup	< 102
		Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup	6,7
		Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	8%
III	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit	74
		Indeks kepuasan layanan kesehatan	80
IV	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%
		Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	18%
		Persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir.	80%
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%
V	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	94%

LAMPIRAN : I

VI	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97%
		Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9,4%
		Angka Melek Huruf	98,3%
VII	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp)	Rp. 53.739 jt
		Jumlah Koperasi Aktif	481
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	23.341 UMKM
VIII	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	8,40%
		Persentase intensitas pengendalian frekuensi konflik sosial Yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	22,03%
IX	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	80,1 - 83.0
		Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	99%
		Angka Pengangguran Terbuka	8,10 - 5,75%
X	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan ekonomi	5,2 - 5,5%
		Inflasi	6 - 7,5 %
		Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	225 - 231 Milyar
XI	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha berwawasan lingkungan	Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)	94%
		Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	35,30%
		Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	100%
		Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%

LAMPIRAN : I

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	4,592,747,900
2	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	3,394,053,762
3	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	3,298,338,848
4	Program Wajar 12 Tahun	100,835,305,150
5	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	63,228,548,729
6	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1,623,502,164
7	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1,632,413,327
8	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	20,308,352,965
9	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,076,810,173
10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	2,334,288,144
11	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	731,194,130
12	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	10,820,217,900
13	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	700,000,000
14	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	65,724,490,180
15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	1,208,600,000
16	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	55,938,804,000
17	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	30,877,653,415
18	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	25,964,757,189
19	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	9,441,337,045
20	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	24,520,929,323
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	15,265,481,120
22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	6,803,750,010
23	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	1,526,202,332
24	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,782,483,300
25	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,550,955,000
26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1,975,941,300
27	Program Penanggulangan Kemiskinan	1,032,539,220
28	Program Penataan Kawasan Sungai	479,195,700
29	Program Pengembangan Data/Informasi	1,744,333,680
30	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan fasilitas perhubungan	4,840,502,968
31	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	5,769,767,611
32	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	1,051,283,558

LAMPIRAN : I

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
33	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	7,964,631,000
34	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2,454,532,600
35	Program Konservasi Sumber Daya Alam	613,872,500
36	Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingkg. Hidup	3,051,280,200
37	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	7,985,296,045
38	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,487,471,956
39	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	1,275,495,790
40	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	936,398,950
41	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1,341,904,000
42	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4,478,407,193
43	Program Rehabilitasi Sosial	7,448,001,909
44	Program Pemberdayaan Sosial	768,206,850
45	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1,989,091,400
46	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1,447,760,450
47	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1,750,136,750
48	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,837,000
49	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	785,021,900
50	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	2,043,053,610
51	Program peningkatan ketahanan pangan	3,836,205,270
52	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	1,074,624,130
53	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	2,043,053,610
54	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	503,248,200
55	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,489,540,790
56	Program Peningkatan Perdagangan	2,559,619,140
57	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	6,545,663,169
58	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya	1,713,256,673
59	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	3,940,357,630
60	Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	960,487,450
61	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,888,732,786
62	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	1,276,242,561
63	Program Fasilitasi Olah Raga	2,897,390,000

LAMPIRAN : I

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
64	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	516,840,000
65	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	2,012,619,810
66	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	26,774,000
67	Program Fasilitasi Pertanahan	15,385,443,930
68	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	3,913,691,473
69	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda	1,699,090,885
70	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	2,197,937,153
71	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	485,485,000
72	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	990,362,000
73	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	420,635,780
74	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1,062,320,558
75	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2,294,460,688
76	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	16,661,323,824
77	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata laksanaan Pemerintah Daerah	3,086,700,850
78	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3,004,977,918
79	Program Peningkatan Layanan pada DPRD	25,694,148,616
80	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1,865,367,050
81	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3,790,234,050
82	Program Pengembangan Karier pejabat Struktural dan Fungsional	797,940,000
83	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2,315,068,700
84	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	724,084,000
85	Program Pengelolaan Barang Daerah	3,646,457,178
86	Program Peningkatan Barang Daerah	30,565,314,554
87	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	71,037,350,827
88	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1,039,952,465
89	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	444,297,319
90	Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku	1,150,919,419
91	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	7,404,152,800
92	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	2,791,853,575
93	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	7,525,245,000

LAMPIRAN : I

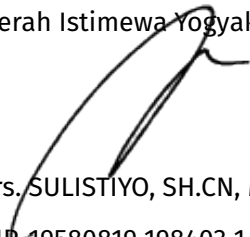
<i>NO</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>ANGGARAN (Rp)</i>
94	Program Peningkatan Ketaatan Hukum	1,313,435,000
95	Program Perlindungan Masyarakat	1,850,902,600
96	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	5,902,116,000
97	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	5,367,110,775
98	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	803,102,316
99	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	1,981,591,100
100	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	656,686,720
101	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	1,465,342,095
102	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	491,741,929
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	2,410,035,000
104	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	572,302,608
105	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	1,703,918,500
106	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedontengen	353,396,607
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	918,285,000
108	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	173,561,395
109	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	768,576,850
110	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	379,923,365
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	889,601,545
112	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	552,951,682
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1,398,819,586
114	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	368,543,019
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	1,884,898,800
116	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	463,710,200

LAMPIRAN : I

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	1,568,198,668
118	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	464,519,960
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1,034,107,660
120	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	316,028,215
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	1,551,190,800
122	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	794,195,437
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	4,020,835,550
124	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	351,805,255
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	1,508,505,454
126	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	2,214,967,360
127	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,056,090,452
128	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	2,999,037,684
129	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	928,875,894
130	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/ Literasi	989,962,881
131	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	928,875,894
132	Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi	13,846,049,191
133	Program Pengembangan Pasar	2,856,517,071

Yogyakarta,

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. SULISTIYO, SH.CN, M.Si
NIP. 19580819 198403 1 005

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B	Kategori penilaian kinerja Instansi Pemerintah	Dalam proses penyusunan LKIP di Bag. Organisasi	0	Masih dalam proses	Peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan	2,012,619,810	1,553,719,289.28	77.20	-
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi	Kategori penilaian EKPPD	sangat tinggi	100%						
		Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal	Wajar (WTP)	Opini penilaian BPK	0	0	Masih dalam proses penilaian oleh BPK	Pengelolaan anggaran daerah	1,039,952,465	971,081,064	93.38	-
								Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana perimbangan	444,297,319	435,355,928	97.99	-
								Penatausahaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1,150,919,419	1,091,700,218	94.85	-
Pengamanan penerimaan pajak daerah	7,404,152,800	4,764,101,021	64.34	-								
II	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	74	Indeks angka harapan hidup	74	100	AHH didapatkan dari data BPS	upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1,623,502,164	1,503,403,766	92.60	-

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan	
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Angka kematian ibu Per seratus ribu Kelahiran Hidup	< 102	$K = \frac{\text{jumlah ibu yang mati (n - tahun)}}{\text{jumlah kelahiran hidup (n - tahun)}} \times 100.000$	114,91	37,33		Upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					
		Angka kematian bayi Per Seribu Kelahiran Hidup	6,7	$K = \frac{\text{jumlah bayi yang mati (n - tahun)}}{\text{jumlah kelahiran hidup (n - tahun)}} \times 1000$	8.62	184.54							
		Prevalensi kekurangan gizi (gisi kurang dan gizi buruk)	8,00%	$K = \frac{\text{jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang}}{\text{jumlah balita yang ada}} \times 100\%$	7.97	99.68							
III	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Rumah sakit	74	Indeks hasil survey kepuasan layanan kesehatan di Rumah Sakit	77.52	104.8		Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	700,000,000	642,840,800	91.83	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	79.8	Indeks hasil survey kepuasan layanan kesehatan di 18 Puskesmas	78,24	98,05	-	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	731,194,130	688,643,943	94.18	-	
IV	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	$\frac{\text{luas cakupan sistem drainase kawasan kota}}{\text{LUU Kota}} \times 100\%$	69.41	63.41	-	Pengembangan Kinerja Pengelolaan saluran air Limbah (SAL)	9,441,337,045	5,707,964,994	60.46	Idikator SPM	
		Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota	18.00%	$\frac{\text{jumlah penduduk yang terlayani}}{\text{jumlah penduduk kota}} \times 100\%$	22.19	0.77	-	Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	15,265,481,120	4,669,080,343	30.59	Indikator IPM	
		Persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir	80%	(volume sampah dari TPS yg terangkut / volume timbunan sampah kota) x 100%	77.98	1.88	-	Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	9,487,471,956	9,066,491,599	95.56	-	

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	$K = \frac{\sum \text{kasus kebakaran}}{\text{Kasus kebakaran yang di tangani}}$	100	100	kasus kebakaran dlm kota maupun luar kota yg ditangani	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	5,902,116,000	4,177,175,000	70.77	-
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	$K = \frac{\sum \text{kasus bencana yg tertangani dalam waktu tanggap}}{\sum \text{Kasus bencana dalam jml kasus waktu}} \times 100\%$	100	100	kasus bencana dalam kota	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	5,367,110,775	4,389,784,126	81.79	-
V	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9	$\frac{\text{jumlah IKM layanan}}{\text{Jumlah layanan}}$	79.11	434	-	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	3,086,700,850	2,743,093,899	88.87	-
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lewan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	94%	$\frac{\text{jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	96.77	2.21	-	pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	3,004,977,918	2,716,539,226	90.40	-
VI	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97%	$APS = \frac{\text{jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$	94.92	3.24	-	Wajib Belajar 12 tahun	100,835,305,150	95,953,125,577	95.16	-
		Persentase Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi	9,4%	$\frac{\text{jumlah sekolah yang melayani inklusi}}{\text{jumlah sekolah}} \times 100\%$	11.96	0.31	-	Pengembangan Pendidikan	21,293,333,750	18,946,496,794	88.98	-

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka melek huruf	98,3%	$\frac{\text{jumlah penduduk} > 15 \text{ thn ke atas yg dpt membaca dan menulis}}{\text{jumlah penduduk} > 15} \times 100\%$	99.92	1.27	-	Program Peningkatan Kualitas dan pemerataan kualitas Pendidikan non formal dan informal	3,298,338,848	3,061,811,107	92.83	-
VII	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Pendapatan Perkapita (Rp.)	Rp.53.739 jt	Hasil pengukuran BPS	Rp.54.306 Jt	101.05	Hasil angka pengukuran pada akhir tahun	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	990,362,000	951,438,675	96.07	-
		Jumlah koperasi aktif	481	Jumlah koperasi aktif	469	97.51	-	Peningkatan kualitas kelembaggan koperasi dan lembaga keuangan mikro	785,021,900	744,224,926	94.80	-
		Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	23.341 UMK	Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah	23.468 UMKM	101	-	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah	2,043,053,610	1,993,196,304	97.56	-
VIII	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Angka kemiskinan	8,4%	Hasil pengukuran BPS	8.67	97	-	Program Penanggulangan Kemiskinan	1,032,539,220	885,901,035	85.80	-
		Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	22,03% per Thn		21.01	-	-	Pengembangan wawasan kebangsaan	516,840,000	468,639,482	90.67	-

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Indek pembangunan manusia	80,1 - 83,0	$\frac{\text{jumlah penduduk produktif yg dibayar}}{\text{jumlah penduduk produktif}} \times 100\%$	84.56	102%	Hasil pengukuran pada akhir tahun	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	990,362,000	951,438,675	96.07	-
		Tingkat kelulusan ujian nasional (Un / Unpk)	99%	$UN = \frac{\text{jumlah siswa yang lulus UN/UNPK}}{\text{jumlah peserta UN dan UNPK}} \times 100\%$	98,67%	99.67		Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dasar	4,592,747,900	3,974,838,990	86.55	
		Angka pengangguran terbuka	8.10-5.75%	$\frac{\text{jumlah penganggur terbuka}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	5.52%	105		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	3,394,053,762	3,101,635,747	91.38	
								Penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1,447,760,450	969,768,277	66.98	
X	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pertumbuhan ekonomi	5,2% -5,5%	Hasil pengukuran BPS	5.46	100%	Hasil angka pengukuran pada akhir tahun	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	926,850,000	900,649,500	97.17	
		Inflasi	6 - 7,5 %	Hasil Pengukuran BPS	4.06%	132.33		Peningkatan perdagangan	2,559,619,140	2,325,167,620	90.84	
		Target Pendapatan pajak dan retribusi daerah	225 -231 milyar	Estimasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	339,199,144,799	146.84%		Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	990,362,000	951,438,675	96.07	-
XI	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha berwawasan lingkungan	Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	$\frac{\text{izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat}} \times 100\%$	102.17	102.17%		Peningkatan Pelayanan Perizinan	2,791,853,575	2,672,718,060	95.73	

LAMPIRAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Keterangan	PROGRAM	Anggaran			Keterangan
					Realisasi	%			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Kota Yogyakarta.	94%	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 yang selesai}}{\sum \text{Pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$	98.55	104.84%		Peningkatan ketentraman dan ketertiban	7,525,245,000	6,486,722,822	86.20	
								Program Peningkatan ketaatan hukum	1,313,435,000	1,107,787,600	84.34	
		Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	35,3%	$K = \frac{\text{Luasan ruang terbuka hijau kota}}{\text{Luas wilayah Kota Yogyakarta}} \times 100\%$	33.77%	95.68%	-	Pengelolaan ruang terbuka hijau	7,985,296,045	7,382,126,562	92.45	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (Per.MENLH No.19/2008 ttg SPM Bid LH dalam Prop. dan Kab/Kota).	100%	$I = \frac{\text{jumlah perusahaan yg mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{jumlah perusahaan yang diawasi}} \times 100\%$	79.73%	122.00%	-	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2,454,532,600	2,179,958,074	88.81	
		Persentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (Per MENLH No.19/2008 ttg SPM Bid.LH dalam Prop. dan Kab / Kota).	100%	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tdk bergerak}}{\text{jumlah perusahaan yang diawasi}} \times 100\%$	79.73	1.47	-					

LAMPIRAN : III

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
(DATA PER TGL 8 FEBRUARI 2017)

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1,595,318,043,914	1,577,628,578,502.84	(17,689,465,411.16)	98.89
PENDAPATAN ASLI DAERAH	515,345,413,629	540,452,950,639.27	25,107,537,010.27	104.87
Pajak Daerah	326,850,000,000	334,057,894,040.92	7,207,894,040.92	102.21
Retribusi Daerah	38,638,041,078	42,113,085,295.00	3,475,044,217.00	108.99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,270,773,163	16,270,773,165.11	2.11	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133,586,599,388	148,011,198,138.24	14,424,598,750.24	110.80
DANA PERIMBANGAN	917,858,726,569	875,430,545,057.00	(42,428,181,512.00)	95.38
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	62,928,532,000	53,510,435,057.00	(9,418,096,943.00)	85.03
Dana Alokasi Umum	670,278,830,000	670,278,830,000.00	-	100.00
Dana Alokasi Khusus	184,651,364,569	151,641,280,000.00	(33,010,084,569.00)	82.12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162,113,903,716	161,745,082,806.57	(368,820,909.43)	99.77
Hibah	3,093,000,000	3,093,000,000.00	-	100.00
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108,860,439,716	108,491,618,806.57	(368,820,909.43)	99.66
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,424,864,000	40,424,864,000.00	-	100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,735,600,000	9,735,600,000.00	-	100.00
Jumlah Pendapatan	1,595,318,043,914	1,577,628,578,502.84	(17,689,465,411.16)	98.89

LAMPIRAN : III

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	1,800,707,338,425	1,667,015,627,844.24	(133,691,710,580.76)	92.58
BELANJA TIDAK LANGSUNG	819,734,400,721	784,415,561,078.00	(35,318,839,643.00)	95.69
Belanja Pegawai	741,905,560,600	716,380,224,954.00	(25,525,335,646.00)	96.56
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	69,460,389,725	62,046,692,034.00	(7,413,697,691.00)	89.33
Belanja Bantuan Sosial	2,173,935,000	1,545,555,000.00	(628,380,000.00)	71.09
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	3,194,515,396	3,031,139,346.00	(163,376,050.00)	94.89
Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	1,411,949,744.00	(1,588,050,256.00)	47.06
BELANJA LANGSUNG	980,972,937,704	882,600,066,766.24	(98,372,870,937.76)	89.97
Belanja Pegawai	171,747,019,722	164,489,567,713.28	(7,257,452,008.72)	95.77
Belanja Barang dan Jasa	521,782,567,591	458,521,157,619.11	(63,261,409,971.89)	87.88
Belanja Modal	287,443,350,391	259,589,341,433.85	(27,854,008,957.15)	90.31
Jumlah Belanja	1,800,707,338,425	1,667,015,627,844.24	(133,691,710,580.76)	92.58
Surplus/(Defisit)	(205,389,294,511)	(89,387,049,341.40)	116,002,245,169.60	43.52

LAMPIRAN : III

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	205,389,294,511	205,392,525,405.46	3,230,894.46	100.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	205,342,170,311	205,342,170,311.46	0.46	100.00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	47,124,200	50,355,094.00	3,230,894.00	106.86
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	205,389,294,511	205,392,525,405.46	3,230,894.46	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	205,389,294,511	205,392,525,405.46	3,230,894.46	100.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

LAMPIRAN : IV



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos 55161 ☎ 0274 – 371977 , Fax 0274 – 371977

EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

**SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

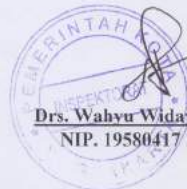
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

INSPEKTUR



Drs. Wahyu Widayat, M.Sc., MM.
NIP. 195804171989031004